BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kajian Strategi Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

LAPORAN AKHIR

November 2021



PENGANTAR

Sebagai Pemerintahan Daerah yang ingin berkomitmen kuat menjalankan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), Kabupaten Bandung Barat telah turut mengupayakan semaksimal mungkin berbagai pelaksanaan program-program TPB melalui prinsip kemitraan. Melalui koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Bandung Barat (KBB)Tahun Anggaran 2021, maka dilaksanakan kegiatan "Kajian Strategi Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan".

Kajian ini dilaksanakan dalam rangka mendorong atau mengakselerasi kinerja pencapaian TPB di Kabupaten Bandung Barat, yang hingga tahun 2021 ini secara strategi implementasinya dirasakan masih dapat dioptimalkan.

Dengan adanya "Kajian Strategi Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" ini, diharapkan BAPPELITBANGDA memiliki suatu rujukan atau saran-saran dari konsultan terpilih, dalam memperbaiki secara berkesinambungan kinerjanya dalam pencapaian TPB atau SDGs, sehingga pada akhir periode SGDs yaitu tahun 2030, KBB dapat mencatatkan kinerja yang baik dan utamanya memperbaiki kualitas hidup penduduk di wilayahnya.

Kabupaten Bandung Barat, November 2021

Tim Penyusun Kajian

bappelitbangda

DAFTAR ISI

BAB 1 – PENDAHULUAN *5*
1.1. LATAR BELAKANG KAJIAN 5
1.2. DASAR HUKUM 6
1.3. PERMASALAHAN 7
1.4. OBJEKTIF KAJIAN 7
1.5. RUANG LINGKUP KAJIAN 8
BAB 2 - KAJIAN TEORITIS UMUM *9*
2.1. TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 9
2.2. KAITAN TPB DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PUSAT 11
2.3. PERAN PEMERINTAH DAERAH 12
2.4. MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) KINERJA TPB 13
2.5. DATA PENCAPAIAN KINERJA TPB 13
BAB 3 – GAMBARAN CAPAIAN TPB KBB *15*
3.1. METODOLOGI PELAKSANAAN KAJIAN 15
3.1.1. PENETAPAN PELAKSANA PEKERJAAN (TAHAP PERSIAPAN) 15
3.1.2. TAHAP PENGUMPULAN DATA 16
3.1.3. PENGOLAHAN DATA 18
3.1.4. ANALISIS DATA 18
3.2. DATA KINERJA TPB KABUPATEN BANDUNG BARAT 20
3.2.1. Pilar Sosial 20
3.2.2. Pilar Ekonomi 21
3.2.3. Pilar Lingkungan 22
3.2.4. Pilar Hukum dan Kelembagaan 23
BAB 4 – HASIL ANALISIS *24*
4.1. HASIL EVALUASI KINERJA CAPAIAN TPB KBB 24
4.2. TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN TARGET TPB 34
4.2.1. Tantangan Pelaksanaan TPB di Indonesia 34
4.2.2. Tantangan Pelaksanaan TPB di Tingkat Daerah 35
4.2.3. Analisis Tantangan dan Hambatan di KBB 35
4.2.4 Kendala dalam Manajemen Data Kinerja TPB 37
BAB 5 – FORMULASI GRAND STRATEGY *38*
BAB 6 – KESIMPULAN KAJIAN *36*
6.1. Kesimpulan 36
6.2. Saran Strategis 36

Lampiran 1 – Masalah vs Rekomendasi
Lampiran 2 – Hasil Jajak Pendapat (Kuesioner)
Lampiran 3 – Rekapitulasi Data Capaian TPB KBB s/d Tahun 2020

bappelitbangda

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - 17 Kelompok Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 9
Gambar 2 - Empat Pilar Pembangunan 10
Gambar 3 - Amanat Perpres nomor 59 tahun 2017 11
Gambar 4 - Rantai Pengaruh atau respon dari program TPB pada level kebijakan Pemerintah Daerah 12
Gambar 5 - Proses Pentahapan Kajian 15
Gambar 6 - Model Analisis SWOT 19
Gambar 7 - Model perumusan strategi TOWS Matrix 19
Gambar 8 - Persentase Pilar Sosial 20
Gambar 9 - Persentase Pilar Ekonomi 21
Gambar 10 - Persentase Pilar Lingkungan 22
Gambar 11 - Presentase Pilar Hukum dan Kelembagaan 23
Gambar 12 - Grafik Rekapitulasi Capaian Pilar Pembangunan Berkelanjutan 31
Gambar 13 - Grafik Pilar Pembangunan Berkelanjutan KBB 33

DAFTAR TABEL

Tabel 1- Data realisasi TPB sampai Tahun 2020 20
Tabel 5 - Pencapaian Indikator TPB KBB 24
Tabel 6 - Pembangunan Pilar Sosial 25
Tabel 7 - Indikator Program Pilar Sosial 26
Tabel 8 - Pembangunan Pilar Ekonomi 27
Tabel 9 - Indikator Program Pilar Ekonomi 27
Tabel 10 - Pembangunan Pilar Lingkungan 28
Tabel 11 - Indikator Program Pilar Lingkungan 29
Tabel 12 - Pembangunan Pilar Hukum dan Kelembagaan 29
Tabel 13 - Indikator Program Pilar Hukum dan Kelembagaan 30
Tabel 14 - Target Sasaran Pilar Prioritas 32
Tabel 15 - Matriks TOWS 33

bappeltbangda

BAB 1 – PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG KAJIAN

Rencana Pembangunan Jangja Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 hingga 2020-2024, bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini sejatinya selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) yang merupakan kesepakatan 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditetapkan pada tahun 2015 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat global termasuk Indonesia. Oleh karenanya TPB sebagai agenda pembangunan global sungguh sejalan dengan RPJMN dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional.

Pembangunan berkelanjutan sudah menjadi kata kunci dalam berbagai aktivitas hidup masyarakat di dunia, sejak dicanangkan pada tahun 1987 oleh komisi lingkungan PBB yang diketuai oleh Gro Harlem Brutland. Pembangunan berkelanjutan yang mengandung makna pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang, namun tidak mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya, telah berkembang melalui berbagai interpretasi skema tujuan yang ingin dicapai. Setelah *Millenium Development Goals* (*MDGs*) menjadi tujuan pembangunan yang dikembangkan sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2015, sekarang ini adalah era *Sustainable Development Goals* (TPB) yang memiliki tujuan lebih komprehensif dan beragam.

Perlu persiapan dan perencanaan yang matang agar di tahun 2030 target TPB berhasil dicapai. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa perlu disusun Peta Jalan Nasional TPB dan RAN TPB. Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030. Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran nasional.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat RAD *SDGs*/TPB digunakan sebagai dokumen rencana kerja di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian *SDGs*/TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan.

Berdasarkan Buku Seri Menyongsong TPB: Kesiapan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (UNPAD, 2018), Kabupaten Bandung Barat masih membutuhkan usaha yang besar untuk mempersiapkan pencapaian TPB. Hal ini mengingat rata-rata skor kesiapan Kabupaten Bandung Barat mendapat nilai 2.23 (C), sedikit lebih tinggi dari skor rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang bernilai 2.16. Berdasarkan hasil proyeksi, rata-rata indikator-indikator TPB di Provinsi Jawa Barat baru setengah jalan untuk dapat memenuhi targetnya pada tahun 2030.

Capaian TPB Kabupaten Bandung Barat dihitung dengan analisis gap dan pengelompokkan capaian, dimana pada tahun 2020 capaian TPB Kabupaten Bandung Barat berdasarkan pengelompokan dibagi menjadi 3 bagian yaitu, tercapai, belum tercapai dan tidak ada data. Berdasarkan data yang dihimpun, hanya 36,8% indikator yang sudah tercapai, 25,5% belum tercapai, dan 37,7% tidak ada data. Kesulitan mendapatkan data menjadi hambatan terbesar dalam menghitung capaian indikator. Ketiadaan data memiliki tiga makna, yakni data yang ada belum terformat sesuai dengan yang diminta dalam indikator TPB, pemerintah daerah belum melakukan pengumpulan data terkait indikator tersebut atau pemerintah daerah belum melakukan kegiatan terkait indikator TPB.

bappeda bandung barat

Untuk itu, terdapat kebutuhan untuk penyesuaian upaya dan strategi agar KBB dapat secara lebih optimal memanfaatkan berbagai potensi daerah dan berbagai elemen Perangkat Daerah, untuk dapat meningkatkan kinerja pencapaian indikator-indikator TPB.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar-dasar hukum yang berlaku dan berkaitan dengan kajian ini yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015- 2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Dearah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

1.3. PERMASALAHAN

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan yang mutlak harus dilakukan oleh KBB beserta segenap jajaran Perangkat Daerah (PD) di bawahnya, untuk mengetahui sejauh mana program-program TPB beserta masing-masing tujuannya, sudah dilakukan. Dalam hal ini, ketersediaan data sangat penting. Data berperan sentral dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, seperti untuk bahan perencanaan, monev dan pengambilan kebijakan, pada target pembangunan. Data juga penting untuk asumsi makro dalam penyusunan APBN (Pemerintah dan DPR), dan menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebijakan sektoral, Kementrian/Lembaga, dan Pemda lainnya.

Tidak dapat dipungkiri, kebutuhan akan data terus mengalami peningkatan baik untuk kepentingan pemerintah maupun swasta, akademisi maupun politisi. Dalam salah satu makalah, ketiadaan data, dapat diibaratkan sebagai "melangkah di dalam lorong gelap tanpa cahaya dan tidak tahu arah". Dalam konteks pembangunan, terdapat ungkapan bahwa membangun data itu merupakan sesuatu yang mahal, namun akan jauh lebih mahal jika membangun tanpa berpedoman pada data.

Demikian pula situasi yang saat ini dialami oleh sebagian PD Kab. Bandung Barat, di mana terdapat lebih dari 30% indikator TPB (37,7% dari 169 indikator) tidak memiliki data. Angka tersebut merupakan jumlah yang siginifikan, sehingga dampaknya terhadap pengukuran kinerja dan perencanaan pembangunan, juga akan berdampak signifikan sehingga terdapat kemungkinan pembangunan yang tidak tepat sasaran. Konsekuensi yang mungkin terjadi akibat ketiadaan atau ketidaklengkapan data pencapaian kinerja TPB adalah:

1. Terdapat kesulitan dalam pemilihan skala prioritas dalam implementasi rencana pembangunan daerah
2. Terdapat kesulitan dalam akurasi pengukuran kinerja KBB dalam TPB
3. Strategi KBB untuk pencapaian TPB yang sejak awal dicanangkan, menjadi tidak berjalan mulus.
4. Pembangunan yang tidak tepat sasaran

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang mungkin tidak dapat diselesaikan dengan cepat, karena untuk mendapatkan data yang akurat, memerlukan data-data lain yang terkait maupun koordinasi dengan unsur-unsur Pemerintahan, masyarakat, atau stakeholder lain. Untuk itu, dalam mengatasi ketiadaan data, perlu disusun strategi agar data dapat tersedia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dan penyesuaian strategi optimalisasi dalam pencapaian target TPB dengan memperhitungkan ketiadaan data sebagai salah satu faktornya. Dari data-data yang ada, untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan pencapaian target *SGDs* di tahun 2030, harus dapat disusun pilar pembangunan TPB mana yang harus diprioritaskan oleh KBB.

Pertanyaan yang selanjutnya timbul adalah apakah dengan adanya sejumlah regulasi terkait TPB, serta adanya pelibatan masyarakat sipil dalam tim koordinasi baik di pusat maupun daerah, maka akan menunjukkan pelaksanaan TPB sesuai dengan mekanisme yang diharapkan, dan apakah pelaksanaan yang ada saat ini telah sesuai dalam mendorong pencapaian TPB pada tahun 2030.

1.4. OBJEKTIF KAJIAN

Dalam menyikapi permasalahan di atas, kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi segenap komponen Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dalam menyusun-langkah-langlah selanjutnya, terutama dalam mengejar ketertinggalan kinerja

bappelitbangda

pencapaian TPB, serta dapat menjdi bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan di wilayah KBB.

1.4.1. MAKSUD

Maksud dari dilaksanakannya kajian *Strategi Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* ini adalah untuk mendapatkan gambaran utuh dari kondisi eksisting kinerja KBB dalam pencapaian target TPB, dan menentukan strategi tindak lanjut dalam meningkatkan kinerja pencapaian program TPB yang sudah dicanangkan oleh KBB.

1.4.2. TUJUAN

Tujuan dari dilaksanakannya kajian *Strategi Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* ini, dengan segala keterbatasan data yang ada, adalah sebagai berikut:

1) Menyusun dan mengevaluasi data capaian TPB 2018-2021
2) Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pencapaian indikator-indikator TPB
3) Merumuskan strategi optimalisasi pencapaian TPB

1.4.3. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah dihasilkannya pekerjaan Kajian Strategi Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2021 adalah agar Kajian ini dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi maupun referensi, serta dimanfaatkan sebagai bahan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perumusan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan TPB di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

1.5. RUANG LINGKUP KAJIAN

Ruang lingkup pekerjaan Kajian Strategi Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu:

1) Analisis umum kinerja/pencapaian Kabupaten Bandung Barat terhadap target Pembangunan Berkelanjutan.
2) Perumusan tantangan dan hambatan dalam pencapaian TPB
3) Formulasi *grand strategy* untuk menunjang pencapaian target TPB

bappelitbangda

BAB 2 - KAJIAN TEORITIS UMUM

2.1. TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) merupakan sebuah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. TPB ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan program sebelumnya yaitu *MDGs* (*Millennium Development Goals*) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Program TPB merupakan rencana pembangunan berkelanjutan di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan (Gambar1) dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan.



Gambar 1 - 17 Kelompok Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) itu adalah sebagai berikut:

1) **Tanpa Kemiskinan**: Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat
2) **Tanpa Kelaparan**: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3) **Kehidupan Sehat dan Sejahtera**: Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
4) **Pendidikan Berkualitas**: Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5) **Kesetaran Gender**: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.
6) **Air Bersih dan Sanitasi Layak**: Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
7) **Energi Bersih dan terjangkau**: Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8) **Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**: Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk semua.
9) **Industri Inovasi dan Infrastruktur**: Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi.
10) **Berkurangnya Kesenjanga**n: Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
11) **Kota dan Pemukiman yang Bekelanjutan**: Menjadikan perkotaan yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan.

bappelitbangda

12) **Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab**: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13) **Penanganan Perubahan Iklim**: Mengambil langkah penting untuk mitigasi perubahan iklim dan mengatasi dampaknya.
14) **Ekosistem Lautan**: Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
15) **Ekosistem Daratan**: Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
16) **Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh**: Mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh– Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
17) **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**: Menghidupkan dan memelihara kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Ketujuh belas tujuan tersebut di atas dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar utama pembangunan (Gambar 2), yaitu:

1. **Pilar Sosial**, yang terdiri dari tujuan-tujuan yaitu Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, dan Kesetaraan Gender**.**
2. **Pilar Ekonomi,** yang terdiri dari tujuan-tujuan yaitu Energi Bersih dan terjangkau, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Industri Inovasi dan Infrastruktur, Berkurangnya Kesenjangan dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
3. **Pilar Lingkungan,** yang terdiri dari tujuan-tujuan yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak, Kota dan Pemukiman yang Bekelanjutan, Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Lautan, dan Ekosistem Daratan
4. **Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola,** dengan Tujuan yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.



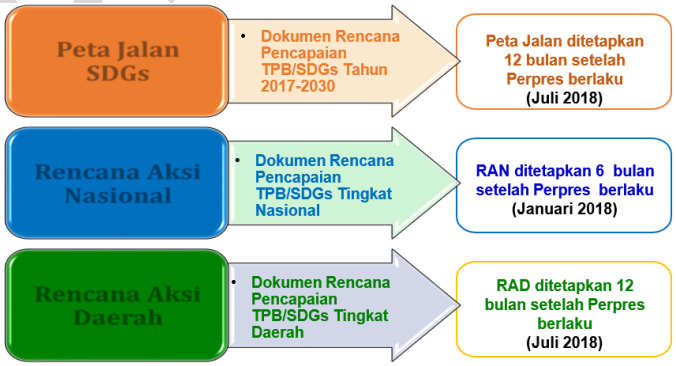
Gambar 2 - Empat Pilar Pembangunan

2.2. KAITAN TPB DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PUSAT

TPB sudah merupakan kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang sebelumnya menggunakan konsep *MGDs* sekarang diganti dengan TPB. *SDGs*/TPB merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*/*MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar. Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan *SDGs*/TPB bersama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar perlu merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) *SDGs*/TPB sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional (Rencana Aksi Nasional/RAN) maupun di tingkat daerah (Rencana Aksi Daerah/RAD).

Upaya Pemerintah untuk melaksanakan perumusan RAN dan RAD sesuai dengan periode pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, juga merupakan bentuk komitmen yang tinggi terhadap *SDGs*/TPB meskipun dunia dan Indonesia sedang menghadapi pandemik COVID-19 yang amat berat. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran *SDGs*/TPB akan disusun 3 (tiga) dokumen perencanaan, yaitu: Peta Jalan *SDGs*/TPB, RAN) *SDGs*/TPB, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) *SDGs*/TPB Provinsi. Untuk menyusun Rencana Aksi *SDGs*/TPB tersebut telah disusun Pedoman sebagai panduan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun di daerah, sehingga dihasilkan Rencana Aksi *SDGs*/TPB yang terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu. Secara garis besar, pedoman penyusunan Rencana Aksi memuat keterkaitan antara *SDGs*/TPB dengan kebijakan pembangunan nasional dan mekanisme penyusunannya. Pedoman Rencana Aksi juga dilengkapi dengan matriks yang berisikan sasaran, program, kegiatan, sumber daya pendukung dan instansi pelaksana.

Renaksi *SDGs*/TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran *SDGs*/TPB. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan bahwa *SDGs* atau dalam peraturan ini disebut sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mengatakan bahwa RAN (Rencana Aksi Nasional) *SDGs*/ TPB harus sudah ditetapkan 6 bulan setelah Perpres berlaku (10 Januari 2018) sedangkan untuk Pemerintah Provinsi harus sudah menetapkan RAD (Rencana Aksi Daerah) *SDGs*/*TPB* paling lambat 12 bulan setelah Perpres berlaku (10 Juli 2018).



Gambar 3 - Amanat Perpres nomor 59 tahun 2017

bappenas

2.3. PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pemetaan dan integrasi target serta indikator *SDGs*/TPB ke dalam agenda pembangunan RPJMD. Peran bagi daerah yang sedang melaksanakan RPJMD adalah membuat pemetaan target dan indikator *SDGs*/TPB yang telah ada dalam RPJMD dan melakukan pemutakhiran target dan indikator *SDGs*/TPB ke dalam RKPD. Bagi Pemerintah Daerah yang sedang dan akan menyusun RPJMD, berperan dengan mengintegrasikan tujuan, target dan indikator *SDGs*/TPB ke dalam RPJMD daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah juga diharapkan mengalokasikan program dan anggaran pembangunan daerah yang selaras dengan *SDGs*/TPB. Berkaitan dengan kewajiban daerah dalam mengintegrasikan *SDGs*/TPB dalam agenda pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Barat yang tengah merancang review RPJMD tersebut pada tahun 2021 ini, perlu untuk melakukan pemutakhiran target dan indikator SDGs/TPB serta mengintegrasikan target dan indikator *SDGs*/TPB ke dalam Perubahan RPJMD tahun 2018-2023.

Pemerintah daerah memiliki berperan sentral dalam pelaksanaan pencapaian TPB. Pemerintah Daerah memiliki kelebihan antara lain:

1) Berada lebih dekat dengan masyarakat di wilayahnya,
2) Memiliki wewenang dan dana
3) Dapat melakukan berbagai inovasi sesuai situasi dan kondisi
4) Ujung tombak penyedia layananpublik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah.



Gambar 4 - Rantai Pengaruh atau respon dari program TPB pada level kebijakan Pemerintah Daerah

Peran Pemerintah dalam menerapkan TPB adalah dengan melakukan lokalisasi yang berarti suatu proses untuk menerapkan dan mengawasi strategi di level lokal yang akan berdampak pada proses pencapaian TPB secara nasional. Lokalisasi ini melibatkan berbagai mekanisme, alat, inovasi, media, dan proses untuk menerjemahkan secara efektif agenda pembangunan menjadi hasil-hasil di level lokal (Reddy, 2016). Lokalisasi dilakukan dengan menyesuaikan dengan budaya lokal, kekayaan dan potensi alam, demografi, yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan penting dalam hal mengembangkan kebijakan lokal, yang pada akhirnya akan memastikan bahwa seluruh proses dipandang sebagai partisipatif, sah, dan kredibel oleh masyarakat sekitar (Reddy, 2016).

bappelitbangda

2.4. MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) KINERJA TPB

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan komponen utama dalam siklus kegiatan atau proses manajemen, dengan tujuan memantau, mengendalikan, menilai, dan melaporkan seluruh pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya, agar lebih efektif dan efisien.

Sebagaimana dikutip dari buku *Panduan Monitoring dan Evaluasi Bagi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah* (INFID, 2019), Monitoring dapat juga didefinisikan sebagai kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Berdasarkan hal tersebut, pemantauan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus-menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program/kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan TPB. Dengan melakukan pemantauan, secara dini diharapkan dapat diketahui apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan; *input* (masukan) telah disalurkan, kualitas dan waktu penyalurannya, serta digunakan sebagaimana mestinya; *output* (keluaran) telah tercapai; dan tindakan-tindakan yang diperlukan telah diambil sesuai dengan rencana.

2.4.1 Kegunaan Monitoring dan Evaluasi

Selanjutmya konsep pemantauan yang disadur dari Dunn (1981), pemantauan setidaknya mempunyai empat manfaat, yaitu:

a. Ketaatan (*compliance*). Pemantauan menentukan apakah tindakan Pemerintah Daerah, dalam hal ini KBB, dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan program mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan, dalam hal ini, apakah pelaksana yang menyusun dan melaksanakan program telah sesuai dengan Tujuan dan Indikator TPB.
b. Pemeriksaan (*auditing*). Proses pemantauan dapat memeriksa apakah sumber daya yang dilakukan telah tepat sasaran, dan bagaimana tingat efektivitas pelaksanaannya.
c. Laporan (*accounting*). Pemantauan dapat menghasilkan data yang membantu mengidentifikasi hasil perubahan sosial atau perilaku masyarakat sebagai akibat dari implementasi suatu kebijakan sesudah periode waktu tertentu. Dengan demikian, sebuah laporan pemantauan harus memuat informasi tentang adanya pemajuan dan perkembangan pencapaian TPB.
d. Penjelasan (*explanation*). Proses pemantauan dapat menghasilkan data dan informasi yang membantu menjelaskan akibat dari adanya perubahan, capaian, dan kendala dalam pelaksanaan TPB.

Hasil proses pemantauan akan menjadi masukan untuk tahap evaluasi karena evaluasi merupakan proses yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pemantauan. Evaluasi berfungsi mengukur kemajuan, melihat sejauh mana penyimpangan terjadi, serta merupakan alat perbaikan dan alat untuk memberikan rekomendasi bagi perencanaan pada siklus berikutnya.

2.5. DATA PENCAPAIAN KINERJA TPB

Berdasarkan buku *Panduan Monitoring dan Evaluasi Bagi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah* (INFID, 2019), Data merupakan ujung tombak penilaian kinerja pencapaian TPB, serta pertimbangan bagi penyusunan rencana dan implementasi rencana aksi. Karena itu, diperlukan perincian yang jelas mengenai indikator-indikator tersebut sebagai pedoman usaha pencapaiannya.

bappeltbangda

Data harus diambil dari semua sumber yang tersedia. Diperlukan data yang akurat, terbaru, dan tepat waktu baik dari sumber resmi maupun tidak resmi yang dapat diakses, dan konsisten dengan standar statistik yang diterima secara global. Data yang dikumpulkan juga harus dapat dipertanggungjawabkan oleh para pengumpul data. Kita harus menyeimbangkan prinsip-prinsip transparansi, memaksimalkan ketersediaan data terpilah, kerahasiaan dan privasi untuk memastikan data pribadi tidak disalahgunakan, atau menempatkan siapa pun dalam risiko sesuai dengan Undang-Undang Statistik.

Kapasitas teknis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data terpilah harus ditingkatkan melalui pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan. Harus disadari bahwa sangat penting bagi semua pihak mendorong pengumpulan data, analisis, dan penggunaan secara tepat dan berkelanjutan sehingga data menjadi berkualitas tinggi untuk dapat digunakan oleh pemerintah ataupun pemangku kepentingan yang lain.

Dalam rangka penyiapan data untuk pelaporan progres pencapaian TPB, maka penting untuk memetakan sumber data berdasarkan situasi periodik waktu di suatu daerah. Hanya, perlu dicatat, data di suatu daerah sering tidak tersedia secara lengkap mulai dari tingkat atas (kabupaten/kota) sampai ke tingkat bawah (desa/kelurahan). Untuk mengatasi masalah tersebut, data warga bisa digunakan. Berdasarkan periodisasinya, jenis data dibagi menjadi tiga, yaitu:

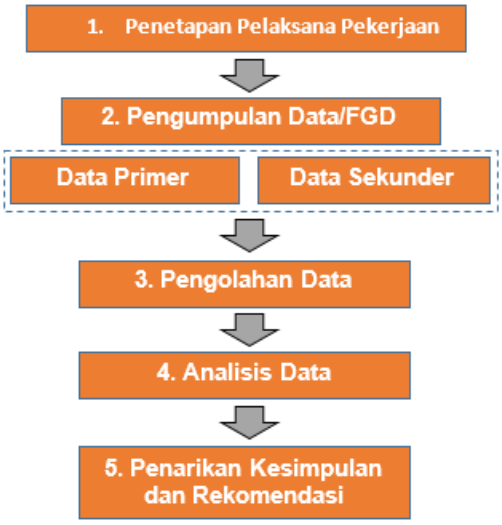
1) Data dasar/*baseline*/awal adalah data informasi dasar yang dihimpun sebelum suatu program dimulai. Data ini digunakan sebagai pembanding untuk memperkirakan dampak program pada pencapaian suatu target. Sumber data dasar/*baseline* yaitu:
   - Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun sebelumnya
   - RAD TPB
   - RPJMD periode sebelumnya
   - RKP dan/atau RKA Perangkat Daerah
2) Data target pencapaian/perencanaan adalah data yang hendak/diharapkan tercapai melalui dokumen perencanaan. Data target pencapaian terdapat dalam bentuk tahunan dan berada dalam dokumen perencanaan. Sumber data target pencapaian:
   - RAD TPB
   - RPJMD
   - RKP/RKA Perangkat Daerah
3) Data hasil pencapaian adalah data hasil kinerja program dan kegiatan pemerintah. Data ini biasanya berada pada dokumen pelaporan kinerja pemerintah. Sumber data pencapaian:
   - Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) terbaru
   - RAD TPB
   - RPJMD periode sebelumnya
   - RKP/RKA Perangkat Daerah

bappeltbangda

BAB 3 – GAMBARAN CAPAIAN TPB KBB

3.1. METODOLOGI PELAKSANAAN KAJIAN

Dalam melakukan kegiatan **Kajian Strategi Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**, akan dilakukan dengan metodologi umum seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 5 - Proses Pentahapan Kajian

3.1.1. PENETAPAN PELAKSANA PEKERJAAN (TAHAP PERSIAPAN)

Tahap Persiapan merupakan tahap inisiasi yang menentukan arah pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya. Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan, di antaranya:

a. Persiapan awal berupa pendalaman KAK, di mana maksud, tujuan, keluaran kajian dikaji kembali.
b. Pendalaman dan penyusunan Metodologi, merupakan penentuan alternatif-alternatif, tools-tools yang dapat digunakan, yang dapat mendukung pencapaian keluaran yang ingin dicapai. Setelah didapatkan metodologi yang sesuai, ditentukan data-data pendukung yang dibutuhkan untuk melaksanakan metodologi kerja tersebut.
c. Penyusunan rencana kerja rinci
   Penyusunan kerja secara rinci merupakan penjabaran dari tahapan-tahap yang dilaksanakan dalam metodologi, perkiraan waktu pelaksanaan serta durasinya, serta peran masing-masing tenaga ahli.
d. Penyiapan RAB
   Dalam mensukseskan tahapan-tahapan dalam metodologi tersebut, perlu disusun perencanaan biaya untuk mendukung teknis pelaksanaannya.
e. Koordinasi dengan stakeholder terkait
   Pelaksanaan metodologi memerlukan kontribusi berupa data, program, kebijakan, maupun opini dari pemangku kepentingan (perusahan, pemerintahan, masyarakat) yang terkait dengan substansi kajian ini. Dengan demikian, pada tahapan ini

bappeldangda

dilakukan inventarisasi pemangku kepentingan dan koordinasi awal dengan masing-masing pemangku kepentingan tersebut.

3.1.2. TAHAP PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dilakukan mengingat data dan informasi merupakan unsur penting dalam proses evaluasi, yang akan menentukan kualitas kesimpulan dan rekomendasi yang disusun.

Berdasarkan cara pengumpulan dan jenis data menurut sumbernya, data dibagi menjadi 2 (dua) diantaranya data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada dari sumber yang terpercaya.

1. **Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya. Dalam pekerjaan ini data primer dapat diperoleh melalui:

a. Data internal KBB

Data internal pada kegiatan ini di antaranya yaitu seluruh dokumen yang terkait dan memuat program TPB KBB, data-data capaian indikator TPB, dokumen rencana/program manajemen, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan pekerjaan ini.

b. Wawancara dengan narasumber yang kompeten

Melalui wawancara dapat diperoleh informasi yang didapatkan secara *first hand* dari stakeholder yang kompeten di bidangnya atau dari pelaku langsung, yaitu dari perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah KBB, yang mampu memberikan data-data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam kegiatan ini, metode wawancara mendalam perlu dilakukan demi mendapatkan gambaran yang utuh dan obyektif.

Sebagai salah satu cara bagi tim penyusun kajian untuk memvalidasi hipotesis awal, dilakukan sebuah jajak pendapat (kuesioner) secara daring melalui Google Form dan dengar pendapat secara luring melalui focused group discussion. Objek dari kuesioner ini adalah perangkat-perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat, yaitu:

1. Inspektorat Daerah;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Sosial:
6. Dinas Pendidikan;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik,
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
10. Dinas Tenaga Kerja
11. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,dan Perlindungan Anak;
14. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

bappelitbangda

17. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
18. Dinas Perumahan dan Permukiman,
19. Satuan Polisi Pamong Praja

Informasi yang diupayaka untuk terhimpun adalah insight dari masing-masing PD terkait pelaksanaan program terkait pencapaian targte TPB di PD masing-masing, pendelegasian tugas, kesanggupan pemenuhan data kinerja TPB, dan koordinasi antar PD, yang diharapkan akan memperkuat analisis mengenai hambatan dan tantangan mengenai implementasi pencapaian TPB di KBB. Daftar pertanyaan dari kuesioner tersebut yaitu:

1. *Nama PD, Nama dan Np HP Pengisi*
2. *Apakah PD Bapak/Ibu sudah memahami peran, tugas maupun kontribusi yang harus dijalankan dalam rangka pencapaian target TPB? (Jika jawaban 'Belum', harap berikan alasan)*
3. *JIKA ADA, mohon disebutkan 1 atau 2 saja program pembangunan (dalam hal ini program yang kaitannya dalam rangka pencapaian target TPB) yang sedang/sudah dilaksanakan oleh PD Bapak/Ibu*
4. *Apakah ada semacam penugasan atau pendelegasian tugas secara resmi dari Kepala Daerah (Kabupaten) atau Provinsi, terhadap PD Bapak/ibu, untuk melaksanakan program-program untuk menunjang pencapaian TPB?*
5. *Dalam hal permintaan data-data capaian TPB tahun 2018-2021 yang diminta oleh Litbang KBB, apakah PD Bapak/Ibu dapat memenuhinya? (Pilih salah satu)*
   a. *Ya, dapat*
   b. *Tidak dapat, data tidak tersedia*
   c. *Ya, tetapi masih mentah dan harus diolah lebih lanjut*
   d. *Belum, butuh proses/koordinasi panjang dengan PD lain*
6. *Apakah saat ini ada rapat koordinasi rutin (mingguan, bulanan, dll) terkait TPB yang harus PD Bapak/Ibu hadiri, dan jika ada, siapa yang mengundang?*
7. *Apa saja kendala yang dihadapi oleh PD Bapak/Ibu sekalian dalam pemenuhan data capaian kinerja TPB (yang diminta oleh Litbang KBB)?*

Respon terhadap kuesioner disajikan secara lengkap dalam lampiran. Meskipun hanya 53% (10 dari 19 PD) yang merespon kuesioner, namun secara umum, hasil jajak pendapat mencerminkan beberapa hal yang cukup penting, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman dari elemen PD mengenai TPB, indikator, maupun target yang harus dicapai, belum optimal dan belum seluruh PD di KBB memahami secara utuh.
2. PD belum sepenuhnya memahami keterkaitan program pembangunan yang dilaksanakannya dengan program pencapaian target TPB
3. PD di KBB belum seluruhnya menerima dan/atau menyadari peran serta penugasan yang diembannya dalam pencapaian target TPB
4. Belum terdapat sistem koordinasi yang optimal baik dalam internal PD, antar PD, maupun antara PD dengan tingkat lebih tinggi (Bupati, Provinsi), untuk transfer data maupun transfer knowledge.

Untuk selanjutnya, poin-poin hasil kuesioner tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan analisis SWOT dan penyusunan strategi di bagian selanjutnya.

bappelitbangda

2. **Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang tersedia dari sumber-sumber eksternal yang bebas diakses, dikumpulkan oleh pihak lain yang bukan ditujukan untuk kepentingan kegiatan evaluasi yang sedang dilakukan saat ini, namun dapat berguna untuk mendukung kegiatan ini. Dalam kegiatan ini, data sekunder dapat diperoleh melalui:

1. Instansi Pemerintahan yaitu badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah KBB
2. Studi literatur dan intellectual property orang lain
3. Situs internet yang valid, bereputasi baik, dan terpercaya
4. Sumber terpercaya lain dari pelaksana kegiatan.

3.1.3. PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data bertujuan untuk menggunakan dan menyajikan seluruh data yang relevan baik primer maupun sekunder, yang relevan dengan kegiatan evaluasi dokumen tersebut di atas, menjadi sekumpulan informasi yang lebih terstruktur, sistematis, serta relevan untuk tahap analisis dan perumusan kesimpulan. Metode pengolahan data yang digunakan meliputi:

a. Penyortiran (*Sorting*)

Penyortiran dilakukan setelah data pertama didapatkan agar dapat dipilah sehingga tidak menumpuk. Kegiatan ini adalah kegiatan mencatat kembali dan memilah-milah data yang didapatkan secara sistematis, sehingga data-data dapat dikelompokkan sesuai kebutuhan yang ditetapkan daam Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan ini.

b. Pengarsipan (*Filing*)

Pembuatan system arsip (*filing)* yang efektif dan efisien sangat penting dalam proses analisis. Proses ini memberikan kesempatan bagi tim evaluator untuk mempermudah penyimpanan data. *Filing* dilakukan dari mulai pengumpulan data, lalu data dikelompokkan ke dalam katagori yang jelas sehingga memudahkan tim kajian untuk menelusuri informasi dan pikiran juga mempermudah dalam proses selanjutnya.

3.1.4. ANALISIS DATA

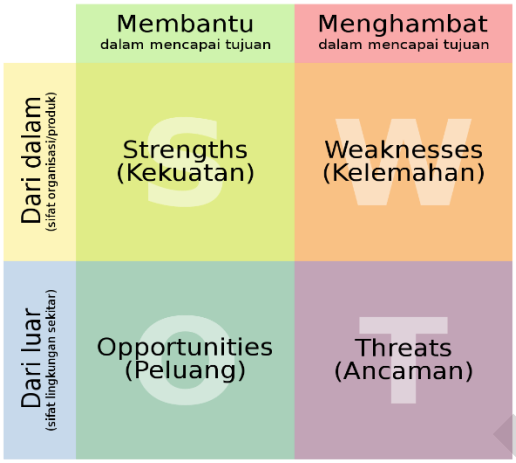
Untuk memformulasikan strategi optimalisasi pencapaian TPB di wilayah KBB, dilakukan pendekatan dengan metode analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal yaitu analisis terkait kesiapan dan program dari internal KBB untuk mendukung pencapaian indikator-indikator SGDs. Sedangkan analisis lingkungan eksternal merupakan analisis lingkungan di luar KBB yang dapat mempengaruhi pencapaian dan pelaksanaan strategi pencapaian TPB.

Untuk analisis lingkungan internal, dilakukan kajian pada dokumen-dokumen perencanaan dan pencapaian TPB milik Badan Perencanaan Pembangunan Deerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah KBB, untuk melihat seberapa baik atau mendukung, kebijakan-kebijakan yang saat ini dilaksanakan, yaitu: kebijakan anggaran, kebijakan pengambilan keputusan, kebijakan pelaksanaan teknis di lapangan, serta kebijakan komunikasi publik mengenai program dan prestasi TPB.

Untuk analisis lingkungan eksternal, Analisis juga akan dilengkapi oleh Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (Weakness), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang terjadi dalam sebuah kegiatan, atau mengevaluasi sebuah kondisi lingkungan.

Bappelitbangda

Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Analisis ini secara logis dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan berkaitan dengan rencana perusahaan serta tujuan perusahaan. Sehingga analisis SWOT dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan, sebagai proses pengambilan keputusan untuk menentukan strategi.



Gambar 6 - Model Analisis SWOT

Analisis perumusan strategi dilakukan melalui metode TOWS Matrix, setelah mendapatkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, di mana elemen Strength and Weakness didapat dari masukan analisis lingkungan internal KBB, sedangkan faktor elemen Opportunity & Threat didapatkan dari elemen analisis lingkungan eksternal. Pola analisis ini secara logis dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan berkaitan dengan rencana perusahaan serta tujuan perusahaan. Sehingga analisis TOWS Matrix dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan, sebagai proses pengambilan keputusan untuk menentukan strategi.

	INTERNAL FACTORS		
EXTERNAL FACTORS		Strengths (S)	Weaknesses (W)
	Opportunities (O)	Strengths/ Opportunities (SO)	Weaknesses/ Opportunities (WO)
	Threats (T)	Strengths/ Threats (ST)	Weaknesses/ Threats (WT)

Gambar 7 - Model perumusan strategi TOWS Matrix

bappelitbangda

3.2.DATA KINERJA TPB KABUPATEN BANDUNG BARAT

3.2.1. Pilar Sosial

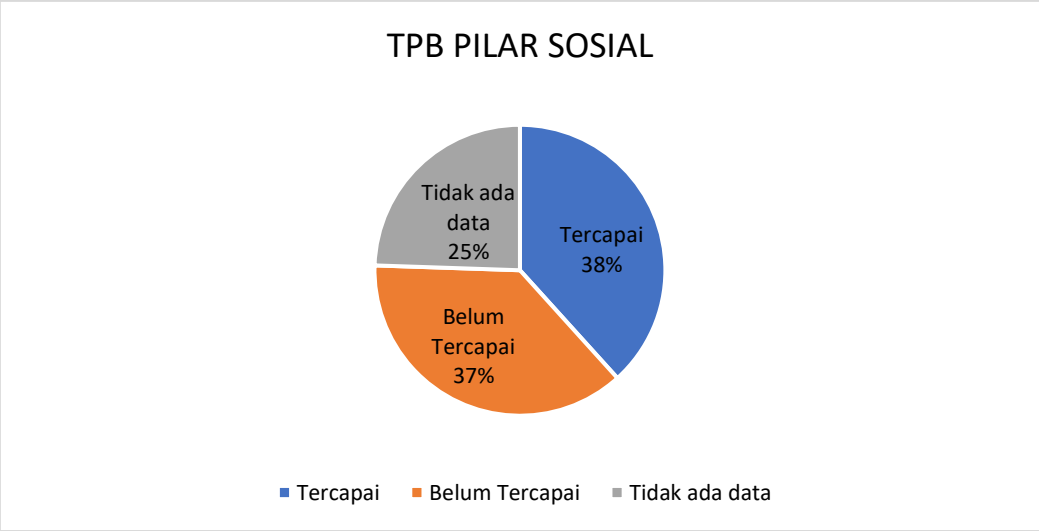
Kinerja TPB Kabupaten Bandung Barat di sektor Pilar sosial, terdapat 5 tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bandung Barat di antaranya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender, adapun jumlah indikator, tercapai, belum tercapai dan tidak ada data dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1- Data realisasi TPB sampai Tahun 2020

			Pencapaian Indikator TPB		
No	Pilar	Indikator TPB	Tercapai	Belum Tercapai	Tidak ada data
1	Tanpa Kemiskinan	23	6	10	7
2	Tanpa Kelaparan	11	6	2	3
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	32	14	9	9
4	Pendidikan Berkualitas	12	5	5	2
5	Kesetaraan Gender	16	5	9	2
	Total	**94**	**36**	**35**	**23**

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pilar sosial jumlah terbesar yang tercapai di tujuan kehidupan sehat dan sejahtera dengan jumlah yang tercapai 14, belum tercapai 9 dan tidak ada data 9, selanjutnya tanpa kemiskinan tercapai 6, belum tercapai 10 dan tidak ada data 7, tentunya berkaitan dengan itu secara keseluruhan jumlah tidak ada data dari pilar sosial masih cukup banyak, sehingga kinerja TPB Kabupaten Bandung Barat Perlu dioptimalkan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya data pilar sosial di presentasekan yang tercapai, belum tercapai dan belum ada data dapat dilihat pada gambar 8 presentase pilar sosial.



Gambar 8 - Persentase Pilar Sosial

3.2.2. Pilar Ekonomi

Kinerja TPB Kabupaten Bandung Barat di sektor Pilar ekonomi, terdapat 5 tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bandung Barat di antaranya energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, Kemitraan untuk mencapai Tujuan. Adapun jumlah indikator, tercapai, belum tercapai dan tidak ada data dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2- Data realisasi TPB sampai Tahun 2020

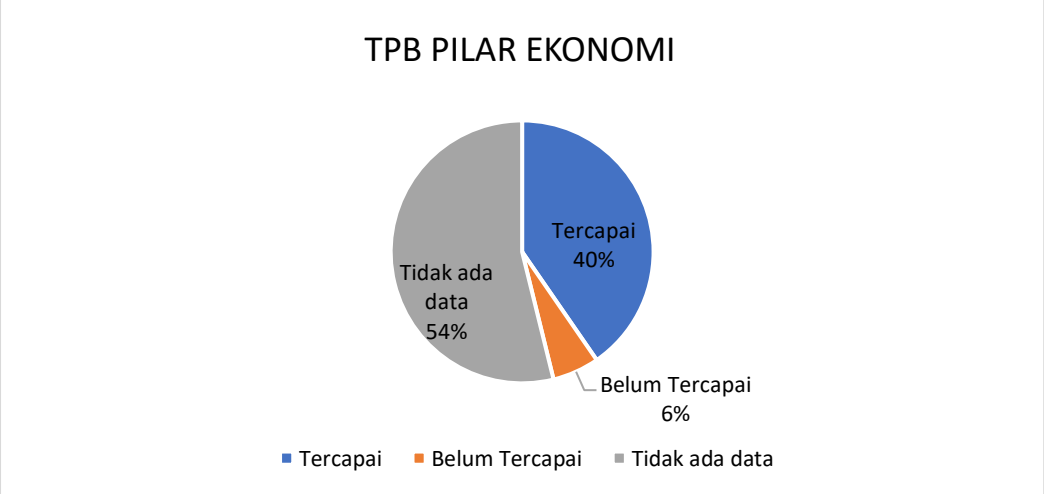
			Pencapaian Indikator TPB		
No	Pilar	Indikator TPB	Tercapai	Belum Tercapai	Tidak ada data
7	Energi Bersih dan Terjangkau	1	0	0	1
8	Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi	18	7	2	9
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	11	5	0	6
10	Berkurangnya Kesenjangan	7	4	1	2
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	15	5	0	10
	Total	52	21	3	28

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pilar ekonomi jumlah terbesar yang tercapai di tujuan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah yang tercapai 7 indikator dari hasil rekapitulasi keseluruhan, belum tercapai 2 dan tidak ada data 9, selanjutnya industri, inovasi dan infrastruktur tercapai 5 indikator dari hasil rekapitulasi, belum tercapai 0 dan tidak ada data 6, selanjutnya berkurangnya kesenjangan tercapai 4 dari hasil rekapitulasi data, belum tercapai 1 indikator dan tidak ada data 2 indikator

Tentunya berkaitan dengan itu secara keseluruhan jumlah tidak ada data dari pilar ekonomi masih cukup banyak, sehingga kinerja TPB Kabupaten Bandung Barat Perlu di optimalkan dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya data pilar ekonomi dipresentasekan yang tercapai, belum tercapai dan belum ada data dapat dilihat pada gambar 9 presentase pilar ekonomi.



Gambar 9 - Persentase Pilar Ekonomi

3.2.3. Pilar Lingkungan

Kinerja TPB Kabupaten Bandung Barat di sektor Pilar Lingkungan, terdapat 5 tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bandung Barat di antaranya air bersih dan sanitasi layak, kota dan permukiman berkelanjutan, produksi berkelanjutan, perubahan iklim dan Keanekaragaman Hayati adapun jumlah indikator, tercapai, belum tercapai dan tidak ada data dapat dilihat pada tabel berikut ini.

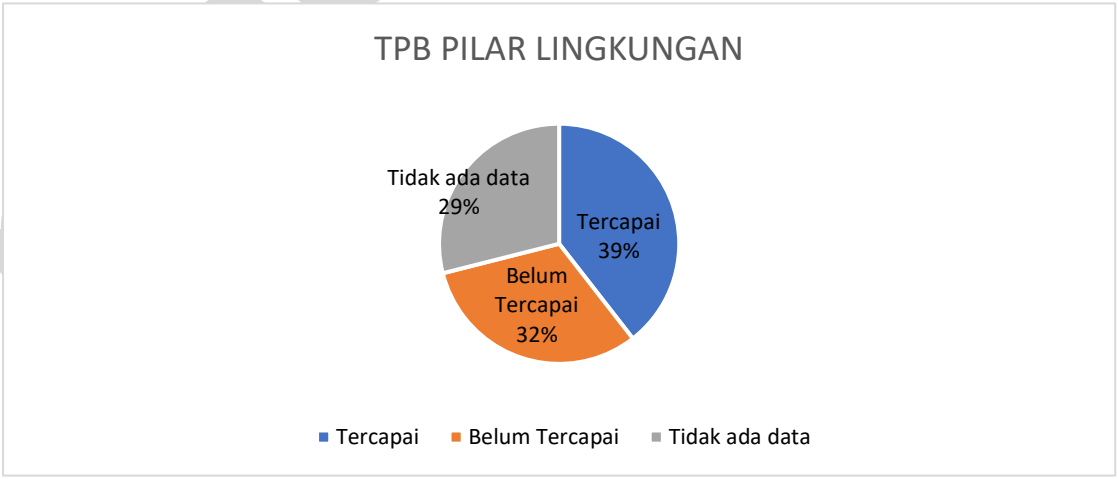
Tabel 3- Data realisasi TPB sampai Tahun 2020

			Pencapaian Indikator TPB		
No	**Pilar**	**Indikator TPB**	**Tercapai**	**Belum Tercapai**	**Tidak ada data**
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	17	**10**	4	3
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	**10**	**3**	**3**	**4**
12	Pola Produksi Berkelanjutan	**5**	**1**	**2**	**2**
13	Perubahan Iklim	**2**	**1**	**1**	0
15	Keanekaragaman Hayati	4	0	2	2
	Total	38	15	12	11

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa hasil rekapitulasi data pilar lingkungan jumlah terbesar yang tercapai di tujuan air bersih dan sanitasi layak dengan jumlah yang tercapai 10 indikator dari hasil rekapitulasi keseluruhan, belum tercapai 4 dan tidak ada data 3, selanjutnya kota dan permukiman berkelanjutan tercapai 3 indikator dari hasil rekapitulasi, belum tercapai 3 dan tidak ada data 4, selanjutnya produksi berkelanjutan tercapai 1 dari hasil rekapitulasi data, belum tercapai 1 indikator dan tidak ada data 2 indikator dan yang terakhir perubahan iklim tercapai 1 indikator, belum tercapai 1 indikator dan tidak ada data 0.

Tentunya berkaitan dengan itu secara keseluruhan jumlah tidak ada data sebanyak 11 indikator dari rekapitulasi keseluruhan tentu angka yang masih cukup banyak, sehingga kinerja TPB Kabupaten Bandung Barat Perlu dioptimalkan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya data pilar ekonomi dipresentasekan yang tercapai, belum tercapai dan belum ada data dapat dilihat pada gambar 10 presentase pilar lingkungan.



Gambar 10 - Persentase Pilar Lingkungan

3.2.4. Pilar Hukum dan Kelembagaan

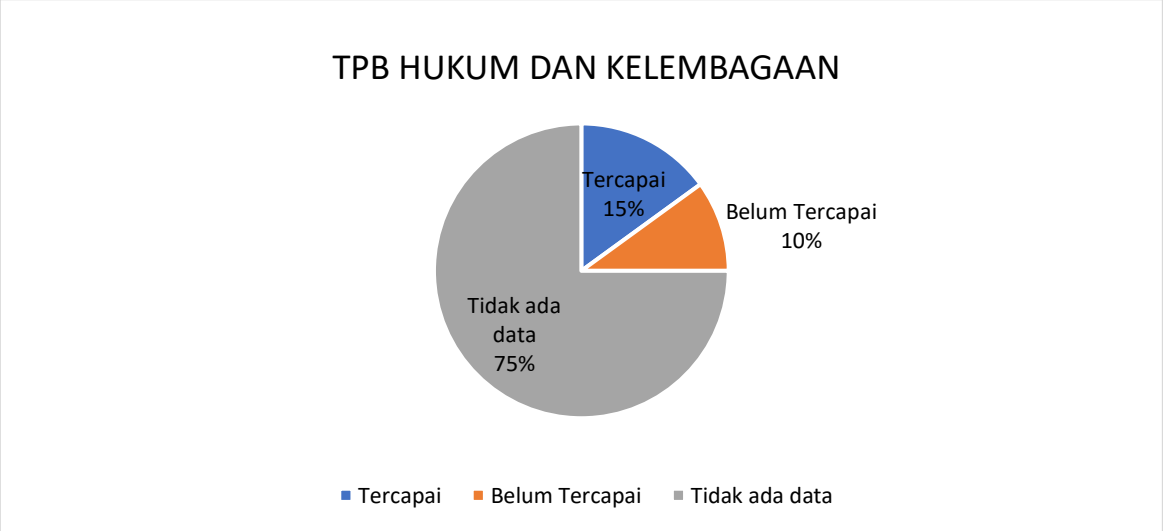
Kinerja TPB Kabupaten Bandung Barat di sektor Pilar Hukum dan Kelembagaan, terdapat 1 tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bandung Barat di antaranya Keadilan sosial, adapun hasil rekapitulasi data tercapai sebanyak 3 dari 20 indikator tujuan pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan kelembagaan, belum tercapai sebanyak 3 indikator dan tidak ada data sebanyak 15 indikator, selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4- Data realisasi TPB sampai Tahun 2020

			Pencapaian Indikator TPB		
No	Pilar	Indikator TPB	Tercapai	Belum Tercapai	Tidak ada data
16	Keadilan Sosial	20	3	2	15

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023

Berdasarkan data tabel di atas maka jika dipresentasekan dari jumlah indikator 20 pada tujuan keadilan sosial maka dapat digambarkan bahwa tujuan yang tercapai sebesar 15%, belum tercapai 10% dan tidak ada data jumlah yang sangat banyak dengan presentase 75%, hal itu disebabkan bahwa hampir seluruh PD (Perangkat Daerah) tidak mengetahui secara konsep maupun teknis yang harus diselelaraskan dengan pelaksanaan SDGs di Kabupaten Bandung Barat.



Gambar 11 - Presentase Pilar Hukum dan Kelembagaan

Berdasarkan data keseluruhan terdapat 29 indikator yang sama/identik dengan indikator lainnya. Sehingga, total indikator TPB Indonesia adalah 290 indikator. Dari 290 indikator, 14 di antaranya merupakan indikator khusus untuk daerah dengan kriteria tertentu. Dengan demikian, indikator yang berlaku umum untuk semua daerah adalah sebanyak 276 indikator

BAB 4 – HASIL ANALISIS

4.1. HASIL EVALUASI KINERJA CAPAIAN TPB KBB

Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan KBB menjadi hal yang penting sehingga di harap seluruh elemen Perangkat Daerah mampu mengoptimalkan tugas dan fungsinya pada Perangkat Daerah di level implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan ini, berbagai kondisi yang didapat KBB menjadi tantangan yang sangat signifikan tentunya untuk menentukan prioritas utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat ini, terlepas membutuhkan komitmen bersama antar pihak untuk menyeleraskan persepsi sampai program yang ada di Perangkat Daerah, adapun tabel di bawah ini hasil dari pencapaian indikator tujuan berkelanjutan Kabupaten Bandung Barat sampai dengan Tahun 2020.

Tabel 2 – Total Pencapaian TPB Kabupaten Bandung Barat

No. TPB		Goals	Indikator TPB	Pencapaian Indikator TPB		
				Tercapai	Belum Tercapai	Tidak ada Data
1	**PIlar Sosial**	Tanpa Kemiskinan	**23**	**6**	**10**	**7**
2		Tanpa Kelaparan	**11**	**6**	**2**	**3**
3		Kehidupan Sehat dan Sejahtera	**32**	**14**	**9**	**9**
4		Pendidikan Berkualitas	12	5	5	2
5		Kesetaraan Gender	**16**	**5**	**9**	2
6	**Pilar Lingkungan**	Air Bersih dan Sanitasi Layak	17	**10**	4	3
7	**Pilar Ekonomi**	Energi Bersih dan Terjangkau	1	0	0	1
8		Pertumbuhan Ekonomi	**18**	**7**	**2**	**9**
9		Industri, Inovasi dan Infrastruktur	**11**	**5**	0	**6**
10		Berkurangnya Kesenjangan	**7**	**4**	**1**	**2**
11	**Pilar Lingkungan**	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	**10**	**3**	**3**	**4**
12		Produksi Berkelanjutan	**5**	**1**	**2**	**2**
13		Perubahan Iklim	**2**	**1**	**1**	0
15		Keanekaragaman Hayati	4	0	2	2
16	**Pilar Hukum dan Kelembagaan**	Keadilan Sosial	**20**	**3**	**2**	**15**
17	**Pilar Ekonomi**	Kemitraan Global	15	5	0	10
	Sub Total	Pilar Sosial	94	36 (38%)	35 (37%)	23 (25%)
		Pilar Ekonomi	52	21 (40%)	3 (6%)	28 (54%)
		Pilar Lingkungan	38	15 (40%)	12 (31%)	11 (29%)
		Pilar Hukum & Kelemb.	20	3 (15%)	2 (10%)	15 (75%)
	TOTAL		**204**	**75**	**52**	**77**
	%		**100**	**36,8**	**25,5**	**37,7**
	Tercapai		36,8			
	Belum Tercapai		25,5			
	Tidak ada data		37,7			

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023

Bappelitbangda

Selanjutnya adapun program yang tidak ada data di pembangunan pilar sosial yang berkaitan dengan program Perangkat Daerah:

Tabel 3 - Pembangunan Pilar Sosial

Pembangunan Pilar Sosial	1) Program bantuan bidang pendidikan 2) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 3) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 4) Program peningkatan kesempatan kerja 5) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 6) Program transmigrasi regional 7) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 8) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 9) Program pembinaan anak terlantar 10) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 11) Program pembinaan panti asuhan/panti jompo 12) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya) 13) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 14) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 15) Program Lingkungan Sehat Perumahan 16) Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 17) Program penanganan darurat kebencanaan 18) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 19) Penyediaan Tempat Tinggal Sementara bagi Pengungsi Rumah Roboh/Rusak Berat, Dilengkapi dengan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi 20) Program penanganan darurat kebencanaan Pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, air bersih dan sanitasi 21) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 22) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana 23) Semua program di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial 24) Program peningkatan ketersediaan dan akses pangan masyarakat 25) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 26) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 27) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa pembangunan pilar sosial memiliki jumlah yang cukup banyak yang tidak ada data dan belum tercapai sebanyak 28 program pada Perangkat Daerah hal ini disebabkan Program yang sudah disusun oleh Perangkat Daerah ada beberapa yang tidak sinkron dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan, namun demikian permasalahan yang Nampak jika dilihat tentunya muncul ketidaksesuaian antara RPJMD dan Target sasaran pembangunan berkelanjutan sehingga menimbulkan disparitas pada pelaksanaan program pada Perangkat Daerah.

Program pembangunan daerah jika melihat Permendagri 86 tahun 2017 perlu mengikuti konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD, mengutip dari peraturan tersebut terkait "pembangunan daerah yang disusun, diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari masing-masing bidang pembangunan berkelanjutan dan menyertakan target pencapaian pada tahun terakhir dokumen

bappelitbangda

perencanaan dengan rincian target pada tiap tahunnya, serta fokus lokasi penerapan program yang diagendakan".

Selanjutnya berkaitan dengan capaian indikator program pada pilar sosial sebagai berikut:

Tabel 4 - Indikator Program Pilar Sosial

Indikator Program Pilar Sosial	1) Persentase penduduk miskin yang menerima bantuan iuran 2) Persentase pencari kerja dilatih yang bekerja 3) Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 4) Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 5) Jumlah transmigrasi yang ditempatkan 6) Persentase KFM yang meningkat produktifitasnya secara sosial ekonomi 7) Persentase PMKS yang mampu menghadapi situasi kritis termasuk korban bencana 8) Persentase anak yang meningkat kemampuanya dalam pemenuhan kebutuhan dasar 9) Persentase penyandang disabilitas yang berfungsi secara fisik 10) Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial 11) Persentase PMKS yang mampu berintegrasi sosial 12) Persentase PSKS yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial 13) Persentase KFM yang meningkat produktifitasnya secara sosial ekonomi 14) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terbangun 15) Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (instalasi pengolahan air limbah domestik) 16) APK/APM SMP 17) Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi 18) Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan 19) Jumlah pembangunan tempat tinggal sementara 20) Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi Jumlah pengadaan kebutuhan dasar pangan Tersedianya bahan kebutuhan sandang dan pangan 21) Persentase PMKS yang mampu menghadapi situasi kritis termasuk korban bencana 22) Persentase Pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat 23) Skor PPH Ketersediaan 24) AKB (Angka Kematian Bayi) 25) Persentase Indikator Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang mencapai target, Pelayanan Kesehatan orang dengan TB, Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinveksi HIV 26) Persentase Indikator Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang mencapai target, Pelayanan Kesehatan orang dengan TB, Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinveksi HIV 27) Jumlah kelompok remaja yang mendapat pembekalan mengenai kesehatan reproduksi remaja.

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023

bappeltbangda

Pada data tabel indikator program pembangunan pilar sosial yang belum tercapai dan tidak ada data memiliki jumlah yang terbilang banyak dari pada pilar lainnya, sehingga dapat dikatakan pembangunan sosial menjadi perhatian prioritas di Kabupaten Bandung Barat.

Jumlah indikator program sebanyak 27 menjadi harapan penuh untuk di kemudian hari dapat tercapai terselesaikannya indikator program yang berkaitan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat.

Selanjutnya adapun program yang tidak ada data di pembangunan pilar ekonomi yang berkaitan dengan program Perangkat Daerah:

Tabel 5 - Pembangunan Pilar Ekonomi

Pembangunan Pilar Ekonomi	1) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 3) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 4) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 5) Program Kemitraan 6) Program Pengembangan Nilai Budaya. 7) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 8) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 9) Program Pemasaran Pariwisata, 10) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 11) Program peningkatan kemampuan teknologi industri 12) Program Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/ Kota melalui Pemanfaatan TIK 13) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 14) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 15) Program Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/ Kota melalui Pemanfaatan TIK 16) Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik 17) Program Penataan Administrasi Kependudukan 18) Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik

Sumber : Data TPB KBB 2021

Terdapat perhatian yang sama dilihat pada tabel di atas menjelaskan bahwa pembangunan pilar ekonomi memiliki jumlah yang cukup banyak kedua dengan tidak ada data dan belum tercapai sebanyak 18 program pada Perangkat Daerah hal ini disebabkan rata-rata Perangkat Daerah banyak yang tidak sinkron antara program yang sudah disusun dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan, namun demikian permasalahan yang Nampak jika di lihat tentunya muncul ketidaksesuaian antara RPJMD dan Target sasaran pembangunan berkelanjutan sehingga menimbulkan disparitas pada pelaksanaan program pada Perangkat Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan target indikator program pada pilar ekonomi sebagai berikut:

Tabel 6 - Indikator Program Pilar Ekonomi

Indikator Program Pilar Ekonomi	1) Persentase Pencari Kerja dilatih yang Bekerja a. Jumlah Kunjungan Wisatawan, 2. Jumlah Destinasi Wisata di kelola pemerintah yang siap kunjung, 3. Jumlah MOU Pengembangan dan Pembangunan Kepariwisataan, 4. Jumlah Lingkung Seni yang aktif. 5. Jumlah Situs Cagar Budaya yang dipelihara, 6. Jumlah Pagelaran Seni Budaya

bappelitbangda

	2) Persentase Pertumbuhan IKM Berdaya Saing 3) Persentase IKM difasilitasi standarisasi produk 4) Persentase PD yang mendapat layanan jaringan komunikasi data yang memadai 5) Persentase Kasus Yang Diselesaikan dengan PB 6) Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah 7) Persentase jumlah program dalam dokumen perencanaan yang teranggarkan dalam APBD 8) Persentase serapan belanja daerah 9) Persentase jumlah PD yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAP 10) Persentase PD yang mendapat layanan jaringan komunikasi data yang memadai 11) Cakupan Penerbitan / Kepemilikan Akta Kematian (IKU)

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023

Pada data tabel indikator program pembangunan pilar ekonomi yang belum tercapai dan tidak ada data memiliki jumlah yang terbilang banyak kedua dari pada pilar lainnya, sehingga dapat dikatakan pembangunan ekonomi menjadi perhatian prioritas di Kabupaten Bandung Barat, disinyalir dengan jumlah indikator program sebanyak 11 menjadi harapan penuh Untuk terselesaikannya capaian indikator program yang berkaitan dengan pembangunan pilar ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat

Selanjutnya adapun program yang tidak ada data dan belum mencapai target di pembangunan pilar lingkungan yang berkaitan dengan program Perangkat Daerah:

Tabel 7 - Pembangunan Pilar Lingkungan

Pembangunan Pilar Lingkungan	1) Program Lingkungan Sehat Perumahan 2) 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 3) Program penanganan darurat kebencanaan 4) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana 5) Program Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan 6) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 7) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana 8) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada kegiatan Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 9) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada kegiatan Pengembangan produksi ramah lingkungan 10) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada kegiatan Pengembangan produksi ramah lingkungan 11) Program penanganan darurat kebencanaan 12) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 13) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 14) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023

bappeltbangda

Terdapat perhatian yang sama dilihat pada tabel di atas menjelaskan bahwa pembangunan pilar lingkungan memiliki jumlah yang cukup banyak kedua dengan tidak ada data dan belum tercapai sebanyak 14 program pada Perangkat Daerah hal ini disebabkan rata-rata Perangkat Daerah banyak yang tidak sinkron antara program yang sudah disusun dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan, namun demikian permasalahan yang Nampak jika di lihat tentunya muncul ketidaksesuaian antara RPJMD dan Target sasaran pembangunan berkelanjutan sehingga menimbulkan disparitas pada pelaksanaan program pada Perangkat Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan target indikator program pada pilar ekonomi sebagai berikut :

Tabel 8 - Indikator Program Pilar Lingkungan

Indikator Program Pilar Lingkungan	1) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terbangun 2) Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (instalasi pengolahan air limbah domestik) 1. Nilai Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara 2. Persentase Penyediaan laporan pengujian kualitas air dan udara 3. Persentase data terkait lingkungan hidup yang dapat diakses 3) Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi 4) Persentase Pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat 5) Presentase volume sampah yang dapat dikelola 6) Jumlah usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan yang dibina/diawasi dan jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti program PROPER, PROPERDA, PROPERKAB 7) Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi 8) Jumlah penyusunan IKTL serta penyelenggaraan Gerakan SATAPOK 9) Jumlah koordinasi serta penyediaan sarana dan prasarana Taman Kehati

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023

Pada data tabel indikator program pembangunan pilar ekonomi yang belum tercapai dan tidak ada data memiliki jumlah yang terbilang banyak ketiga dari pada pilar lainnya, sehingga dapat dikatakan pembangunan lingkungan tak kalah menjadi perhatian prioritas di Kabupaten Bandung Barat, di sinyalir dengan jumlah indikator program sebanyak 9 menjadi harapan penuh untuk di kemudian hari dapat tercapai terselesaikannya indikator program yang berkaitan pembangunan pilar lingkungan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya adapun program yang tidak ada data dan belum mencapai target di pembangunan pilar hukum dan kelembagaan yang berkaitan dengan program Perangkat Daerah:

Tabel 9 - Pembangunan Pilar Hukum dan Kelembagaan

Pembangunan Pilar Hukum dan Kelembagaan	1) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3) Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A) 4) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa

bappelitbangda

	6) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 7) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 8) Program Penataan Administrasi Kependudukan 9) Program penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023

Terdapat perhatian yang sama dilihat pada tabel 12 menjelaskan bahwa pembangunan pilar hukum dan kelembagaan memiliki jumlah yang cukup banyak terakhir dengan tidak ada data dan belum tercapai sebanyak 9 program pada Perangkat Daerah.

Pelaksanaan program pada perangkat daerah terdapat ketidaksinkronan antara program yang sudah disusun dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan, namun demikian permasalahan yang Nampak jika di lihat tentunya muncul ketidaksesuaian antara RPJMD dan Target sasaran pembangunan berkelanjutan, sehingga menimbulkan disparitas pada pelaksanaan program pada Perangkat Daerah.

Selanjutnya berkaitan dengan target indikator program pada pilar hukum dan kelembagaan sebagai berikut:

Tabel 10 - Indikator Program Pilar Hukum dan Kelembagaan

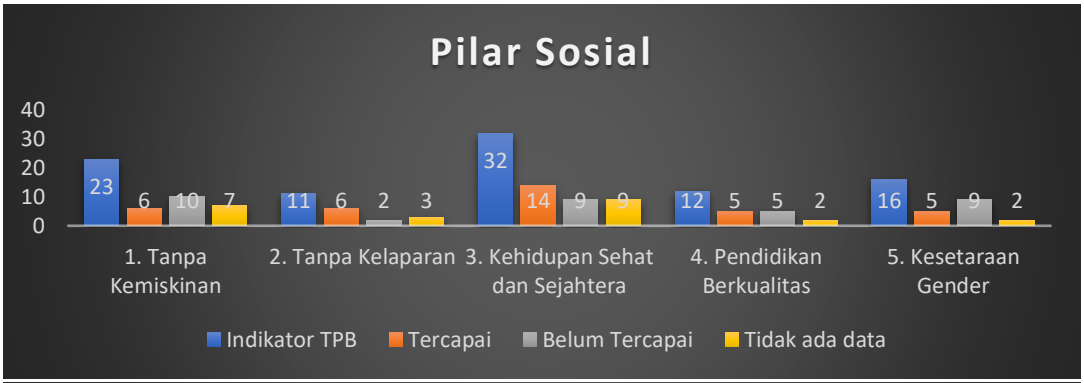
Indikator Program Pilar Hukum dan Kelembagaan.	1) Cakupan patroli petugas (kali/hari) 2) Persentase Penegakan Perda 3) Jumlah Terbentuknya lembaga P2TP2A di setiap Kecamatan 4) Persentase jumlah program dalam dokumen perencanaan yang teranggarkan dalam APBD. Persentase serapan belanja daerah3. Persentase jumlah PD yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAP 5) Persentase pengadaan barang dan jasa melalui ULP 6) Jumlah objek pengawasan 7) Cakupan Penerbitan / Kepemilikan Akta kelahiran usia 0-18 Tahun (IKU) 8) Persentase Perangkat Daerah yang mengelola informasi publik dengan baik

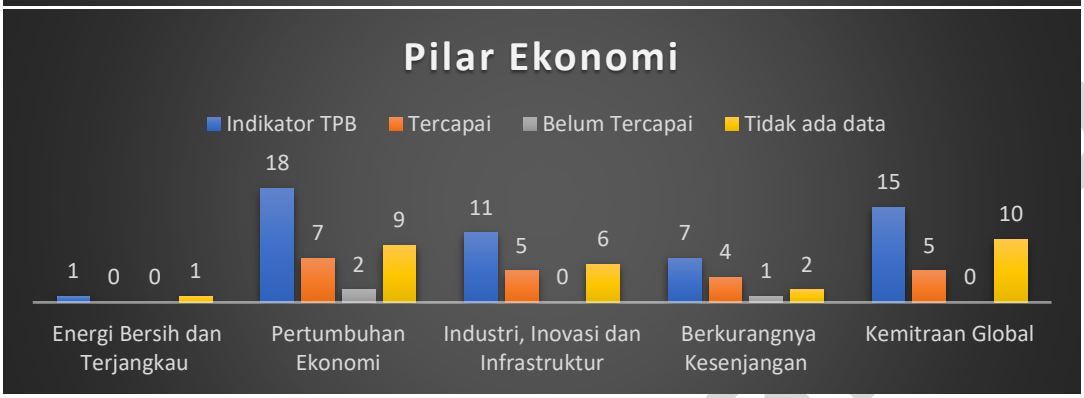
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023

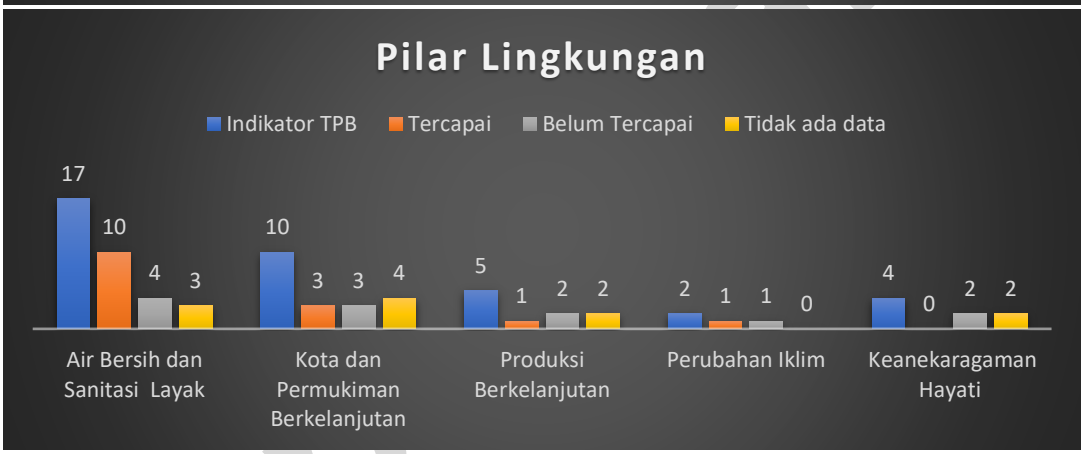
Pada data tabel indikator program pembangunan pilar hukum dan kelembagaan yang belum tercapai dan tidak ada data memiliki jumlah yang terbilang banyak ketiga dari pada pilar lainnya, sehingga dapat dikatakan pembangunan hukum dan kelembagaan tak kalah menjadi perhatian kedepan di Kabupaten Bandung Barat, Jumlah indikator program sebanyak 8 menjadi harapan penuh untuk di kemudian hari dapat tercapai terselesaikannya indikator program yang berkaitan pembangunan pilar hukum dan kelembagaan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat.

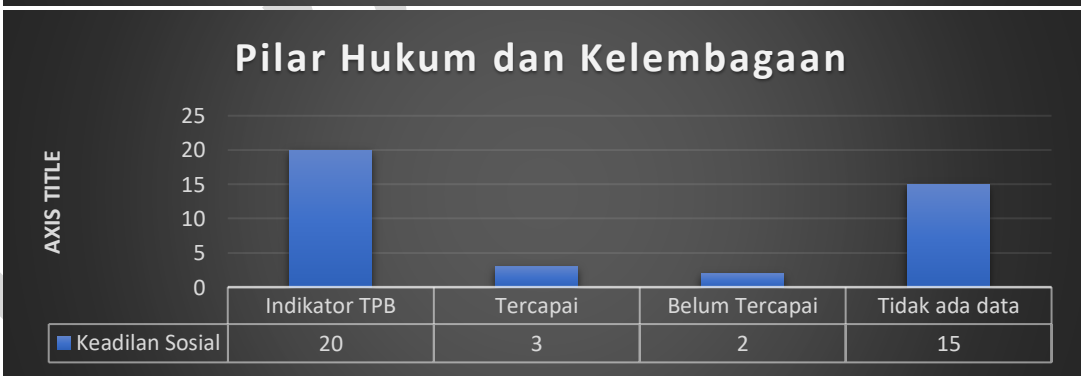
Selanjutnya grafik pada setiap pilar pembangunan berkelanjutan dengan mengambarkan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan, yang tercapai, belum tercapai dan tidak ada data di Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

bappeltbangda









Sumber: Data TPB KBB Tahun 2021

Gambar 12 - Grafik Rekapitulasi Capaian Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan pada gambar di atas dapat dilihat pada setiap pilar jumlah tercapai, belum tercapai dan tidak ada data.

Pilar Sosial dan Pilar Hukum dan Kelembagaan saling berkaitan sehingga dapat dijadikan rekomendasi untuk dijadikan prioritas utama dalam pemetaan setiap pilar di Kabupaten Bandung Barat, dan selanjutnya yaitu Pilar Ekonomi dan Pilar Lingkungan.

Pemetaan SDGs secara keseluruhan pada satu tahun anggaran APBD diperkirakan tidak memungkinkan, hal itu tentu berkaitan dengan kekuatan sumber APBD Kabupaten Bandung Barat, maka dari itu diperlukan perencanaan yang berkelanjutan serta komitmen pembangunan berkelanjutan yang tinggi bagi *stakeholders* di Kabupaten Bandung Barat. Target sasaran prioritas pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan secara bertahap baik melalui pemetaan SDGs pada setiap pilar, penyusunan roadmap dan studi banding.

Berkaitan dengan hal itu selanjutnya disusun target sasaran pilar prioritas berdasarkan pada Gambar 12 Grafik Pilar Pembangunan Berkelanjutan sebagai berikut:

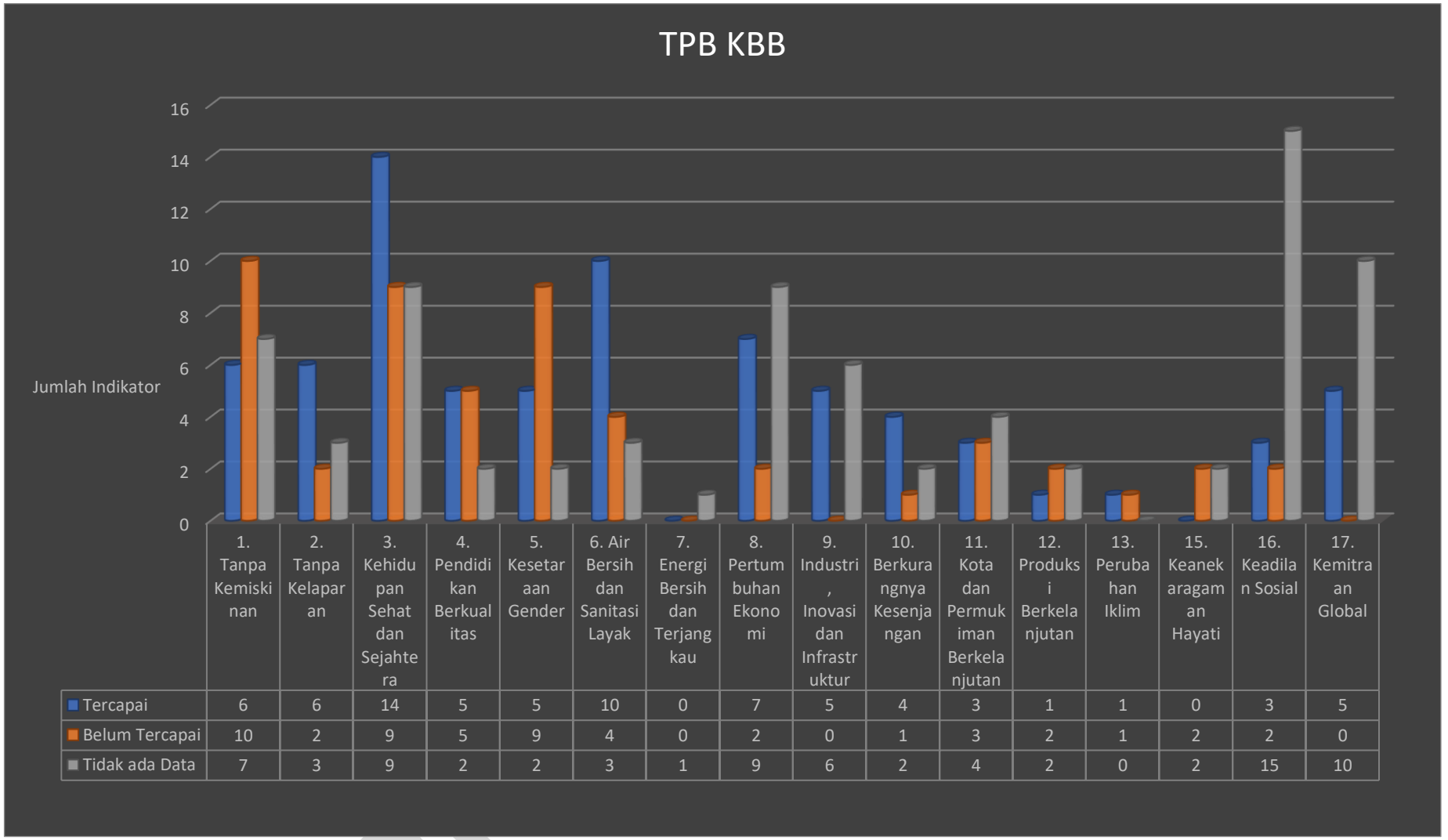
Tabel 11 - Target Sasaran Pilar Prioritas

No	Pilar Prioritas	PD Pelaksana/Yang Terlibat
1	Pembangunan Pilar Sosial dan Pilar Hukum dan Kelembagaan	*Pilar Sosial:* Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, DP2KBP3A, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, BPBD *Pilar Hukum dan Kelembagaan:* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Satpol PP; Inspektorat Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah; DP2KBP3A; Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
2	Pembangunan Pilar Ekonomi	Dinas Tenaga Kerja; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
3	Pembangunan Pilar Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup; BPBD; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Permukiman.

Dalam pelaksanaanya, pilar prioritas tersebut dilaksanakan oleh PD-PD, yang penugasannya diharapkan sesuai dengan relevansi antara tupoksi PD dengan program-program pembangunan pilar terkait.

Usulan tahun target sasaran pilar prioritas dapat menjadi usulan kedepan dalam perumusan RPJMD Kabupaten Bandung Barat sesuai arahan Permendagri 86 tahun 2017 terkait focus pada konsep integrasi pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

bappelitbangda



	1. Tanpa Kemiskinan	2. Tanpa Kelaparan	3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	4. Pendidikan Berkualitas	5. Kesetaraan Gender	6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	7. Energi Bersih dan Terjangkau	8. Pertumbuhan Ekonomi	9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	10. Berkurangnya Kesenjangan	11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	12. Produksi Berkelanjutan	13. Perubahan Iklim	15. Keanekaragaman Hayati	16. Keadilan Sosial	17. Kemitraan Global
Tercapai	6	6	14	5	5	10	0	7	5	4	3	1	1	0	3	5
Belum Tercapai	10	2	9	5	9	4	0	2	0	1	3	2	1	2	2	0
Tidak ada Data	7	3	9	2	2	3	1	9	6	2	4	2	0	2	15	10

Gambar 13 - Grafik Pilar Pembangunan Berkelanjutan KBB

Sumber: Data TPB KBB Tahun 2021

4.2. TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN TARGET TPB

Dalam proses penyusunan strategi Perangkat Daerah, analisa isu-isu strategis adalah salah satu bagian terpenting. Dengan analisis isu yang tepat, maka PD akan mampu memberikan masukan mengenai prioritas pembangunan mana yang sebaiknya dijalankan dan dipertanggung jawabkan. Isu strategis didapatkan dari analisis internal (berupa keunggulan/kekuatan dan kelemahan) dan dari analisis ekstenal (berupa kondisi yang menciptakan peluang dan juga ancaman). Strategi yang disusun patut memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian target. Hal ini akan terangkum dalam analisis SWOT pada bagian selanjutnya.

4.2.1. Tantangan Pelaksanaan TPB di Indonesia

TPB merupakan sebuah seruan segera untuk bertindak mengakhiri kemiskinan sambil meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, dan mengatasi perubahan iklim. Peringkat Indonesia dalam Indeks SDG 2020 telah mengalami peningkatan, dari peringkat 102 pada 2019 menjadi 101 dari 166 negara. Indeks ini mengukur kinerja berdasarkan kemajuan pencapaian 17 tujuan dalam SDGs. Meski mengalami peningkatan, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Dalam laporan 'The Sustainable Development Goals and Covid-19', 10 dari 17 SDGs di Indonesia telah membaik di mana terdapat stagnasi untuk tujuan 5 (Kesetaraan Gender), 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan), 14 (Ekosistem Laut), 15 (Ekosistem Daratan), dan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Terlepas dari perkembangan positif di bidang-bidang tertentu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), 10 (Berkurangnya Kesenjangan), 15 (Ekosistem Daratan), dan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Berdasarkan SDG Center Unpad, tantangan yang dihadapi tersebut tidak terlepas dari masih terdapatnya beberapa hal yang segera harus diperbaiki. Hal-hal tersebut di antaranya:

1) Belum semua provinsi memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD), hanya 23 dari 34 Provinsi, sehingga pengarus-utamaan dalam RPJMD masih belum dilakukan seluruh provinsi.
2) Beberapa target nasional belum ditentukan, pada road map hanya ada 33 indikator yang tercantum targetnya.
3) Ketersediaan data hanya ada sekitar 140 indikator pada level nasional dan provinsi (sekitar 40 indikator masih menggunakan teknik Small Area Estimation atau SAE) dari 319 indikator yang harus dimonitor dan dievaluasi.
4) Belum dilakukan prioritisasi target/indikator per tahun dan per lima tahun sampai 2030.
5) Masih terjadi *less attention* dan *less coverage* tentang TPB dari sisi publikasi dan komunikasi oleh para *stakeholder*nya.

Saat ini, Kementerian PPN masih dalam tahap penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) 2020–2024 yang mencakup aksi untuk mencapai tujuan TPB/*SDGs* pasca pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, Kementerian PPN/Bappenas sudah mempersiapkan solusi sebagai skenario dalam jangka pendek, menengah, dan panjang untuk implementasi TPB/*SDGs*.

Dengan adanya pandemi, secara nasional, pemerintah pusat perlu me*re-setting* target nasional serta regional untuk seluruh indikator, mengimplementasi dan identifikasi kebijakan

bappelitbangda

yang tepat sebagai input yang dibutuhkan untuk mencapai target TPB. Selanjutnya, political will dan komitmen diharapkan terus terjaga.

4.2.2. Tantangan Pelaksanaan TPB di Tingkat Daerah

Tantangan utama yang akan dihadapi oleh kabupaten yaitu strategi komunikasi, pembiayaan, dan menyiapkan daerah untuk mengadopsi dan melaksanakan TPB pada masing-masing kabupaten/kota. Terkait Komunikasi, terdapat problem sosialisasi secara vertikal dan horisontal untuk menyebarluaskan TPB baik kepada PD maupun masyarakat, di mana hal ini merupakan dampak dari fakta bahwa Perangkat Daerah yang lebih banyak mengetahui mengenai TPB dalam sistem birokrasi adalah Bappelitbangda atau Bappeda, sedangkan Perangkat Daerah yang lainnya belum mendapatkan sosialisasi yang baik. Selain itu, sosialisasi TPB kepada masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat dan daerah karena yang diharapkan TPB akan melibatkan semua pihak (inklusi), agar tercapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, sesegera mungkin, disarankan secara bertahap sudah dilakukan implementasi dari strategi komunikasi yang baik dalam menerjemahkan TPB itu seperti apa, sehingga TPB bisa dipahami ASN dan masyarakat melalui strategi komunikasi tersebut.

Pemahaman ini sangat penting mengingat aplikasi TPB di lapangan maupun secara administrasi dan birokrasi bukan hal yang sederhana. Pemahaman yang mendalam oleh PD akan berdampak kepada terintegrasinya tujuan-tujuan TPB ke dalam perencanaan pembangunan, sehingga diharapkan akan mendorong percepatan kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengejar pencapaian tujuan TPB.

Sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, hampir seluruh sendi dan sektor pembangunan, baik pemerintahan maupun swasta, mengalami penurunan kinerja. Hal ini cukup mempengaruhi hasil pekerjaan atau hasil program pembangunan yang sudah berhasil dilaksanakan sebelum pandemi terjadi. Di samping itu, terdapat isu-isu baru ataupun strategis yang muncul. Hampir seluruh tujuan TPB terpengaruh oleh adanya pandemi, yang utama dan paling disorot adalah meningkatnya angka kemiskinan dan meningkatnya jumlah pengangguran. Dengan demikian, terdapat banyak seruan dari para pakar agar daerah memasang target-target yang sudah disesuaikan sebagaimana kondisi yang terjadi akibat dampak pandemi di daerahnya masing-masing.

4.2.3. Analisis Tantangan dan Hambatan di KBB

Secara umum, kondisi pelaksanaan TPB di tingkat nasional juga terjadi dalam skala yang lebih kecil yaitu di tingkat kabupaten, khususnya dalam hal ini Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan utama yang terjadi di KBB secara sekilas adalah permasalahan manajemen data dan komunikasi. Lebih lanjut, analisis pelaksanaan TPB di KBB akan dilakukan melalui metode analisis SWOT.

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan (Rangkuti, 2009). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan *(Strenghts)* dan peluang *(Opportunities)* namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan *(Weaknesses)* dan ancaman *(Threats)*. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey, yang memimpin proyek riset pada Univeritas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an.

Analisis SWOT sudah mencakup tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung Barat dalam mengejar pencapaian adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat

bappelitbangda

memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

1. Strength (Kekuatan)

1) Kabupaten Bandung Barat memiliki sistem Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang sangat baik.
2) Kabupaten Bandung Barat memiliki sistem meritokrasi dalam birokrasi, yang telah diakui sangat baik oleh negara.
3) Sistem mutasi, rotasi Pejabat PD yang cukup kerap diberlakukan.

2. Weakness (Kelemahan)

1) Perangkat Daerah tidak mengagendakan rapat rutin lintas PD untuk membahas khusus pencapaian target TPB, khususnya terkait pengawasan dan evaluasi, maupun optimalisasi pelaksanaan program-pogram yang sedang berjalan.
2) Adanya tingkat pemahaman yang belum optimal dari organisasi perangkat daerah terhadap TPB, pilar pembangunan, indikator-indikator, maupun kaitannya dengan perencanaan pembangunan di level kabupaten.
3) *Data collecting system* antar PD yang belum optimal, sehingga kondisi saat ini terjadi di KBB adalah masih terdapat banyak PD yang belum mampu menyediakan data capaian sesuai satuan indikator TPB, sehingga data yang terkumpul di Bappelitbangda belum kunjung lengkap.

3. Opportunity (Peluang)

1) COVID-19 membuka peluang dan merupakan suatu momentum untuk meninjau ulang target pencapaian.
2) Sinergi dengan aplikasi SDG Desa yang belum optimal, sehingga masih terdapat peluang perbaikan untuk menghimpun data secara lebih akurat.
3) Posisi strategis wilayah Kabupaten Bandung Barat, bila dilihat dari perspektif sistem perkotaan Metropolitan Bandung Raya seiring dengan pertumbuhan sektor industri dan pengembangan pemukiman yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat. Hal ini berpotensi mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi.

4. Threat (Ancaman)

1) Pandemi memukul mundur kemajuan yang sudah dicapai, di antaranya yang terpenting yaitu tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran yang meningkat.
2) Perbedaan konteks maupun nomenklatur pada program pembangunan, antara indikator TPB dengan produk kebijakan daerah (RPJMD atau SPM), atau standar BPS (Walidata), sehingga program yang sama dianggap berbeda.
3) Masih terdapat perbedaan metadata untuk data capaian indikator TPB, dan metadata yang dijadikan acuan oleh berbagai organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, diperlukan standar atau acuan yang seragam dalam penggunaan metadata, sehingga output yang dihasilkan akan lebih konsisten.
4) PD seringkali menugaskan personil yang berbeda-beda untuk hadir pada rapat terkait TPB, sehingga sering terjadi putusnya rantai informasi.

Selanjutnya, hasil identifikasi masing-masing SWOT ini akan digunakan sebagai modal dalam perumusan grand strategy melalui matriks TOWS.

bappelitbangda

4.2.4 Kendala dalam Manajemen Data Kinerja TPB

Pemerintah provinsi Jawa Barat menugaskan Pemerintah Daerah termasuk KBB untuk menyusun matriks program-program pembangunan skala kabupaten/kota yang mendukung terhadap pencapaian targat-target TPB. Namun demikian, hingga saat kajian ini disusun, hal tersebut masih diupayakan dan masih dalam proses pemenuhan oleh KBB

TPB sendiri menawarkan target pembangunan yang spesifik, terikat waktu dan dapat dikuantifikasi yang sinkron dengan rencana dan prioritas pembangunan. Sebagian besar data TPB membutuhkan disagregasi (pengumpulan) data berdasarkan lokasi, jenis kelamin, usia, pendapatan dan dimensi relevan lainnya. BPS sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penyediaan data melalui publikasi berjudul Kajian Indikator Sustainable Development Goals (TPB) tahun 2014 menerangkan bahwa Sumber Data, Periodisasi, Level Penyajian, dan Disagregasi Indikator TPB yang Tersedia di Indonesia terdapat 72 Indikator.

Pada kenyataannya, program-program pembangunan yang direncanakan oleh Kabupaten Bandung Barat hampir seluruhnya memiliki irisan dengan indikator-indikator TPB, atau bahkan serupa. Data-data penyusun atau komponen data capaian TPB hampir seluruhnya sudah tersedia, namun demikian perlu diolah lebih lanjut, dilakukan beberapa penyesuaian dan koordinasi antar PD sehingga data-data yang tersedia dapat disajikan sebagai data kinerja TPB, yang sesuai dengan nomenklatur TPB.

Data maupun metadata TPB berjumlah cukup banyak, dan dalam pengelolaannya membutuhkan upaya yang tidak sedikit. Kondisi saat ini terjadi di KBB adalah masih terdapat banyak PD yang belum mampu menyediakan data capaian sesuai satuan indikator TPB. Ketidak mampuan tersebut dapat dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok:

1) Data-data tersebut masih dalam berupa data mentah (masih harus diolah lebih lanjut)
2) Data-data tersebut tersedia namun harus berkoordinasi dengan PD lainnya.
3) Data yang tersedia belum merupakan data yang termutakhir (ter-update).

Penyusunan perencanaan pembangunan berkelanjutan menggunakan metadata SDG's sebagaimana telah terangkum dalam buku Ringkasan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia yang disusun oleh Kementerian Perancanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2017) sebagai acuan ini, merupakan hal sangat strategis dalam kaitan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Penggunaan metadata SDG's ini akan berpengaruh terhadap semua indikator dan target capaian kinerja pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemahaman setiap Perangkat Daerah terhadap metadata SDG's yang diacu menjadi sangat penting agar penyusunan perencanaan relevan dan selaras antara indikator dan target capaian SDG's dengan indikator dan target capaian program yang menjadi visi misi kepala daerah. Diperlukan adanya edukasi kepada Perangkat Daerah agar seluruh jajaran Perangkat Daerah memahami indikator dan target capaian program yang menjadi komitmen kepala daerah.

Ditinjau dari manajemen stategis, perencanaan dan penganggaran daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam fungsi manajemen (Yuwono dkk, 2008:67). Oleh karena itu, tak terkecuali dalam konteks TPB, perencanaan yang baik merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterahkan rakyatnya. Dokumen RKPD dan APBD merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dalam membahas APBD perlu menekankan pada sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

BAB 5 – FORMULASI *GRAND STRATEGY*

Berdasarkan faktor-faktor SWOT pada bagian sebelumnya, maka dilakukan penentuan alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks TOWS. Metode ini mengarah pada brainstroming untuk menciptakan strategi- strategi alternatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh PD KBB. Hal ini mendorong para *leaders* untuk menciptakan baik strategi-strategi pertumbuhan maupun pengurangan matriks TOWS dapat diaplikasikan baik pada perusahaan bisnis tunggal maupun multibisnis dan bahkan untuk unit bisnis.

Melalui matriks ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi S-O, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya;
2. Strategi S-T, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman;
3. Strategi W-O, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada;
4. Strategi W-T, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Menurut Umar (2003 : 229) perlu diketahui bahwa kegunaan dari setiap alat pada matching stage adalah untuk membangkitkan strategi alternatif yang fleksibel untuk dilaksanakan, bukan untuk memilih atau menentukan strategi mana yang terbaik. Jadi, tidak semua strategi dikembangkan di dalam TOWS Matriks.

Analisis SWOT paling sederhana mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dan mengetahui kelemahan dan kekuatan lawan. Bila sudah dapat dipastikan bahwa dapat memenangkan pertempuran, maka perkembangannya untuk jangka panjang dan dalam menghadapi pesaing semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan, tahap selanjutnya memanfaatkan semua informasi ke dalam model strategi agar dapat memperoleh analisis yang lebih lengkap dan akurat.

Maka alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah Matriks TOWS yang digunakan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelamahan yang dimilikinya. Sehingga agar dapat memaksimalkan kekuatan dan merebut peluang yang ada sehingga berhasil.

bappeltbangda

Tabel 12 - Matriks TOWS

EFAS \ IFAS	**Kekuatan (*Strengths*):** 1. KBB memiliki sistem Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang sangat baik. 2. KBB memiliki sistem meritokrasi dalam birokrasi, yang telah diakui sangat baik oleh negara. 3. Sistem mutasi, rotasi Pejabat PD yang cukup kerap diberlakukan.	**Kelemahan (*Weaknesses*):** 1. Tidak terdapat agenda rutin antar PD pembahasan terkait TPB; 2. Tingkat pemahaman yang belum optimal dari PD; 3. Belum optimalnya *data collecting system*;
Peluang (*Opportunities*): 1. Pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk meninjau ulang target pencapaian TPB; 2. Sinergi dengan aplikasi SDGs Desa belum optimal, sehingga terdapat peluang untuk perbaikan manajemen data; 3. Posisi strategis wilayah KBB, peluang dalam percepatan pembangunan pasca pandemi bisa lebih cepat.	**Strategi SO** • Re-setting pola pikir terhadap TPB • Membuat skala prioritas Pilar Pembangunan dalam TPB (prinsip "low hanging fruit") • Membuat suatu mekanisme sinergi dengan pihak-pihak lain untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SDGs Desa • Memasukkan ketepatan pelaporan (penyetoran data kinerja indikator TPB) ke dalam penilaian kinerja PD terkait.	**Strategi WO** • Program pengembangan knowledge, capacity dan inovasi untuk mengimplementasikan TPB • Penetapan agenda rutin lintas PD untuk membahas isu-isu terkini pencapaian kinerja KBB dalam pencapaian TPB • Pembentukan tim/pokja khusus koordinator kinerja TPB KBB
Ancaman (*Threats*): 1. Pandemi memukul mundur kemajuan yang sudah dicapai, tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran yang meningkat; 2. Perbedaan konteks maupun nomenklatur pada program pembangunan, antara indikator TPB dengan produk kebijakan daerah (RPJMD atau SPM), atau standar BPS (Walidata); 3. Masih terdapat perbedaan metadata untuk data capaian indikator TPB, dan metadata yang dijadikan acuan oleh berbagai organisasi Perangkat Daerah; 4. PD seringkali menugaskan personil yang berbeda-beda untuk hadir pada rapat terkait TPB, sehingga sering terjadi putusnya rantai informasi.	**Strategi ST** • Merumuskan sistem komunikasi yang lebih efektif dan masif antar dan dalam satu PD • Meninjau ulang dan memaksimalkan penggunaan Buku Ringkasan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia • Menyegerakan pembentukan forum "Satu Data" untuk keselarasan data TPB lintas PD • Strategi anggaran yang tepat	**Strategi WT** • Adanya pedoman yang menjembatani antara nomenklatur atau tata nama kegiatan perencanaan pembangunan digunakan oleh PD dengan tata nama yang ada pada TPB.

Dari rekomendasi alternatif- alternatif strategi pada tabel di atas, secara garis besar dapat dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, yaitu:

1. **Strategi Komunikasi.** Agar TPB/SDGs menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi. Strategi komunikasi yang tepat juga akan mengakselerasi tingat pemahaman dan peningkatan kapasitas. Untuk melaksanakan RAD TPB/SDGs diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik di lingkup Pemerintah Daerah (PD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.
   Hal yang mendasar dalam penyusunan konsep komunikasi adalah mengenai pola pikir dan sudut pandang, terlebih dalam masa hantaman pandemi. Pelaksanaan program pembangunan yang berdasar TPB merupakan opportunity solusi persoalan Pandemi Covid 19, bukan Covid 19 memberikan eksternalitas negatif bagi TPB. Respon terhadap pandemi tidak dilepaskan dari target TPB

2. **Strategi Kelembagaan Khusus TPB.** Sebuah badan, tim, atau kelompok kerja yang khusus menangani koordinasi untuk TPB akan mengemban tugas yang cukup berat, yaitu mengkoordinasikan Bappelitbangda, PD, Walidata, dan mengoptimalkan SDGs Desa. Badan khusus ini merupakan kepanjangan tangan langsung dari Kepala Daerah (melalui Keputusan Bupati) dan berfungsi untuk membantu mengakselerasi kinerja TPB KBB dari sisi administratif dengan cara mencermati, mensinkronisasikan, menyelaraskan, melakukan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan dengan 17 tujuan dalam TPB, memberikan pemahaman yang lebih baik akan pentingnya TPB untuk kemajuan regional KBB, memberikan saran dan rekomendasi pilar pembangunan untuk diprioritaskan serta, sinkronisasi antara indikator TPB dan RPJMD dan menyiapkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

3. **Optimalisasi Pemutakhiran Data dan Dokumen.** Dokumen TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Untuk itu, berangkat dari titik metadata yang sama, dengan membawa pedoman kebutuhan data yang sama, dan dan hal-hal terkait data yang mutlak disepakati lintas PD. Adanya pedoman yang menjembatani antara nomenklatur atau tata nama kegiatan perencanaan pembangunan digunakan oleh PD dengan tata nama yang ada pada TPB, merupakan salah satu yang mendesak. Untuk itu, adanya sebuah forum "satu data" perlu diimplementasikan dengan segera.

Secara umum, strategi di atas menunjukkan bahwa tujuan akhirnya tidak mengalami perubahan yaitu pencapaian TPB, namun yang disesuaikan adalah metode-metode dalam rangka pencapaiannya, dan dilakukan dengan sebaik mungkin.

Bappelitbangda dapat menjadi salah satu motor utama dengan mensosialisasikan apa yang menjadi program nasional untuk selanjutnya dijadikan acuan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai bidangnya masing-masing.

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan strategi yang akan dirumuskan, maka dibutuhkan sebuah *political will* yang kuat dari Kepala Daerah beserta jajarannya. Harapan

bappelitbangda

yang ingin dicapai diharapkan dalam 1-2 tahun mendatang strategi ini sudah dapat terlaksana, mengingat untuk mencapai target TPB di tahun 2030 hanya tersisa kurang dari satu dekade.

Hal lainnya adalah strategi anggaran yang tepat. Penganggaran memegang peranan penting sebagai *essential tools* untuk menjadikan sebuah perencanaan dapat terlaksana. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran. Oleh karena itu, antara perencanaan pembangunan dan penganggaran harus selaras sehingga perencanaan dapat terlaksana secara optimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah.

bappelitbangda

BAB 6 – KESIMPULAN KAJIAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan mengenai strategi optimalisasi tujuan, serta indikator tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bandung Barat, berikut beberapa butir pokok yang dapat disarikan:

1) Pemilihan skala prioritas dalam implementasi rencana aksi daerah dari 17 tujuan SDGs, Kabupaten Bandung Barat memfocuskan menjadi 14 tujuan SDGs yang di anggap relevan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Bandung Barat, Dari Indikator SDGs terdapat 96 indikator dari 4 pilar pembangunan, yakni pilar sosial berjumlah 46 indikator, pilar ekonomi berjumlah 20 indikator, pilar lingkungan 24 dan pilar hukum dan kelembagaan 6, rekapitulasi Hasil capaian kinerja SDGs Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan tercapai 36,8%, belum tercapai, belum tercapai 25,5% dan tidak ada data 38%, Tujuan pembangunan berkelanjutan pilar sosial terdapat indikator yang masih banyak belum optimal disebabkan tidak ada data dan belum mencapai target sehingga menjadi pilar yang paling tepat untuk dijadikan prioritas pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya pilar ekonomi yang menjadi prioritas nomor kedua dari jumlah terbanyak yang belum mencapai target, prioritas ketiga di pembangunan pilar lingkungan dan terakhir pilar hukum dan kelembagaan.
2) Saat ini belum terlihat sinkronisasi antara SDGs dengan tools pembangunan daerah seperti RPJMD, RESTRA dll.
3) Terdapat kesulitan dalam akurasi pengukuran kinerja KBB dalam TPB dapat disimpulkan masih belum optimal di Kabupaten Bandung Barat. Strategi KBB untuk pencapaian TPB yang sejak awal dicanangkan, menjadi tidak berjalan mulus, namun demikian Adapun strategi yang dapat digunakan untuk kemudian hari dalam optimalisasi pencapaian pembangunan berkelanjutan dapat di pergunakan Strategi optimalisasi tujuan berkelanjutan SDGs Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari strategi komunikasi, strategi kelembagaan dan Optimalisasi Permutakhiran Data dan Dokumen.

6.2. Saran Strategis

1) **Strategi Kelembagaan Khusus TPB.** Sebuah badan, tim, atau kelompok kerja yang khusus menangani koordinasi untuk TPB akan mengemban tugas yang cukup berat, yaitu mengkoordinasikan Bappelitbangda, PD, Walidata, dan mengoptimalkan SDGs Desa. Badan khusus ini merupakan kepanjangan tangan langsung dari Kepala Daerah (melalui Keputusan Bupati) dan berfungsi untuk membantu mengakselerasi kinerja TPB KBB dari sisi administratif dengan cara mencermati, mensinkronisasikan, menyelaraskan, melakukan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan dengan 17 tujuan dalam TPB, memberikan pemahaman yang lebih baik akan pentingnya TPB untuk kemajuan regional KBB, memberikan saran dan rekomendasi pilar pembangunan untuk diproritaskan serta, sinkronisasi antara indikator TPB dan RPJMD dan menyiapkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

bappelitbangda

2) **Strategi Komunikasi.** Agar TPB/SDGs menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi. Strategi komunikasi yang tepat juga akan mengakselerasi tingat pemahaman dan peningkatan kapasitas. Untuk melaksanakan RAD TPB/SDGs diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik di lingkup Pemerintah Daerah (PD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.
3) **Optimalisasi Pemutakhiran Data dan Dokumen.** Dokumen TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Untuk itu, berangkat dari titik metadata yang sama, dengan membawa pedoman kebutuhan data yang sama, dan dan hal-hal terkait data yang mutlak disepakati lintas Perangkat Daerah. Untuk itu, adanya sebuah forum "satu data" perlu diimplementasikan dengan segera.

6.3 Rekomendasi Tindak Lanjut

1) Pentingnya kajian lebih lanjut terkait pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat dengan memfocuskan pada setiap pilar yang menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan.
2) Perlunya kajian terkait strategi model hexagon collaborative governance lintas sektor terkait pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat.
3) Pentingnya komitmen daerah terkait pembangunan berkelanjutan dalam bentuk kelembagaan yang tertuang dalam perwal atau perbup maka diperlukan kajian lebih lanjut terkait kelembagaan dan Naskah Akademik.
4) Perlunya membuat sistem satu data berkaitan dengan data SDGs di Kabupaten Bandung Barat.
5) Perlunya ada studi komparasi / studi banding dengan Kabupaten / Kota lain.
6) Pentingnya peningkatan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.

bappelitbangda

LAMPIRAN KAJIAN

1. **MASALAH VS REKOMENDASI**
2. **HASIL JAJAK PENDAPAT (KUESIONER)**
3. **REKAPITULASI DATA CAPAIAN TPB KBB S/D TAHUN 2020**

bappelitbangda

LAMPIRAN 1
MASALAH VS REKOMENDASI

Merujuk kepada permasalahan yang telah diuraikan dalam Laporan, maka berikut ringkasan permasalahan beserta rekomendasi untuk mengatasinya.

Masalah	Rekomendasi
1. Terdapat kesulitan dalam pemilihan skala prioritas dalam implementasi rencana pembangunan daerah	• Perlunya satu data sistem SDGS berbasis APPS atau lainnya. • Merumuskan sistem komunikasi yang lebih efektif dan masif antar dan dalam satu PD • Penetapan agenda rutin lintas PD untuk membahas isu-isu terkini pencapaian kinerja KBB dalam pencapaian TPB
2. Terdapat kesulitan dalam akurasi pengukuran kinerja KBB dalam TPB	• Perlunya payung hukum: Perda atau Perbup untuk pembentukan tim atau Pokja yang fokus pada monev TPB • Merumuskan sistem komunikasi yang lebih efektif dan masif antar dan dalam satu PD
3. Strategi KBB untuk pencapaian TPB yang sejak awal dicanangkan, menjadi tidak berjalan mulus.	• Perlunya peningkatan kapasitas terkait SDGS melalui pelatihan, BIMTEK dll. • Program pengembangan knowledge, capacity dan inovasi untuk mengimplementasikan TPB • Penetapan agenda rutin lintas PD untuk membahas isu-isu terkini pencapaian kinerja KBB dalam pencapaian TPB
4. Pembangunan yang tidak tepat sasaran	• Perlu pemetaan dan selanjutnya Roadmap TPB di KBB. • Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan target TPB • Studi komparasi/studi banding dengan daerah lain

bappelitbangda

LAMPIRAN 2
HASIL JAJAK PENDAPAT (KUESIONER)

"Kajian Strategi Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan"

di Bapelitbangda KBB (Oktober – November 2021)

Responden: Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat

bappelitbangda

Kuesioner Singkat - TPB KBB

Kuesioner ini disusun oleh Konsultan dalam rangka analisis dalam kegiatan "Kajian Strategi Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" di Bapelitbangda KBB. Mengingat pentingnya kuesioner ini, mohon bantuannya agar diisi selambat-lambatnya pada hari JUMAT, 29 Oktober 2021. Terima kasih.

1	**NAMA PD, PENGISI, NO HP.** **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**
2	**Apakah PD Bapak/Ibu sudah memahami peran, tugas maupun kontribusi yang harus dijalankan dalam rangka pencapaian target TPB? (Jika jawaban 'Belum', harap berikan alasan)** **Belum. Data-data yang diminta berada di luar bidang tugas saya, sehingga memerlukan koordinasi antar kepala bidang** **Belum. Data-data yang diminta berada di luar bidang tugas saya, sehingga memerlukan koordinasi antar kepala bidang**
3	**JIKA ADA, mohon disebutkan 1 atau 2 saja program pembangunan (dalam hal ini program yang kaitannya dalam rangka pencapaian target TPB) yang sedang/sudah dilaksanakan oleh PD Bapak/Ibu** **Program pembangunan yang sedang berlangsung, peningkatan penerimaan apbd dari sektor pariwisata**
4	**Apakah ada semacam penugasan atau pendelegasian tugas secara resmi dari Kepala Daerah (Kabupaten) atau Provinsi, terhadap PD Bapak/ibu, untuk melaksanakan program-program untuk menunjang pencapaian TPB?** Belum tahu
5	**Dalam hal permintaan data-data capaian TPB tahun 2018-2021 yang diminta oleh Litbang KBB, apakah PD Bapak/Ibu dapat memenuhinya? (Pilih salah satu)** **a. Ya, dapat** **b. Tidak dapat, data tidak tersedia** **c. Ya, tetapi masih mentah dan harus diolah lebih lanjut** **d. Belum, butuh proses/koordinasi panjang dengan SKPD lain**
6	**Apakah saat ini ada rapat koordinasi rutin (mingguan, bulanan, dll) terkait TPB yang harus PD Bapak/Ibu hadiri, dan jika ada, siapa yang mengundang?** **Harus. Bagian litbang, mungkin dengan grup wa biar lebih mudah nya**
7	**Apa saja kendala yang dihadapi oleh PD Bapak/Ibu sekalian dalam pemenuhan data capaian kinerja TPB (yang diminta oleh Litbang KBB)?** **Skpd menugaskan orang yang berbeda-beda pada setiap rapat litbang. Sehingga kehilangan jejak update litbang**

bapelitbangda

Kuesioner Singkat - TPB KBB

Kuesioner ini disusun oleh Konsultan dalam rangka analisis dalam kegiatan "Kajian Strategi Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" di Bapelitbangda KBB. Mengingat pentingnya kuesioner ini, mohon bantuannya agar diisi selambat-lambatnya pada hari JUMAT, 29 Oktober 2021. Terima kasih.

1	**NAMA PD, PENGISI, NO HP.** **Inspektorat Daerah**
2	**Apakah PD Bapak/Ibu sudah memahami peran, tugas maupun kontribusi yang harus dijalankan dalam rangka pencapaian target TPB? (Jika jawaban 'Belum', harap berikan alasan)** Belum karena belum mendapat informasi yg cukup terkait peran, tugas maupun kontribusi yg harus dijalankan
3	**JIKA ADA, mohon disebutkan 1 atau 2 saja program pembangunan (dalam hal ini program yang kaitannya dalam rangka pencapaian target TPB) yang sedang/sudah dilaksanakan oleh PD Bapak/Ibu** -
4	**Apakah ada semacam penugasan atau pendelegasian tugas secara resmi dari Kepala Daerah (Kabupaten) atau Provinsi, terhadap PD Bapak/ibu, untuk melaksanakan program-program untuk menunjang pencapaian TPB?** -
5	**Dalam hal permintaan data-data capaian TPB tahun 2018-2021 yang diminta oleh Litbang KBB, apakah PD Bapak/Ibu dapat memenuhinya? (Pilih salah satu)** **a. Ya, dapat** **b. Tidak dapat, data tidak tersedia** **c. Ya, tetapi masih mentah dan harus diolah lebih lanjut** **d. Belum, butuh proses/koordinasi panjang dengan SKPD lain**
6	**Apakah saat ini ada rapat koordinasi rutin (mingguan, bulanan, dll) terkait TPB yang harus PD Bapak/Ibu hadiri, dan jika ada, siapa yang mengundang?** **Baru sekali**
7	**Apa saja kendala yang dihadapi oleh PD Bapak/Ibu sekalian dalam pemenuhan data capaian kinerja TPB (yang diminta oleh Litbang KBB)?** **Kurangnya informasi**

bappelitbangda

Kuesioner Singkat - TPB KBB

Kuesioner ini disusun oleh Konsultan dalam rangka analisis dalam kegiatan "Kajian Strategi Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" di Bapelitbangda KBB. Mengingat pentingnya kuesioner ini, mohon bantuannya agar diisi selambat-lambatnya pada hari JUMAT, 29 Oktober 2021. Terima kasih.

1	**NAMA PD, PENGISI, NO HP.** **Satpol PP**
2	**Apakah PD Bapak/Ibu sudah memahami peran, tugas maupun kontribusi yang harus dijalankan dalam rangka pencapaian target TPB? (Jika jawaban 'Belum', harap berikan alasan)** **ya**
3	**JIKA ADA, mohon disebutkan 1 atau 2 saja program pembangunan (dalam hal ini program yang kaitannya dalam rangka pencapaian target TPB) yang sedang/sudah dilaksanakan oleh PD Bapak/Ibu** Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	**Apakah ada semacam penugasan atau pendelegasian tugas secara resmi dari Kepala Daerah (Kabupaten) atau Provinsi, terhadap PD Bapak/ibu, untuk melaksanakan program-program untuk menunjang pencapaian TPB?** **Ya**
5	**Dalam hal permintaan data-data capaian TPB tahun 2018-2021 yang diminta oleh Litbang KBB, apakah PD Bapak/Ibu dapat memenuhinya? (Pilih salah satu)** **a. Ya, dapat** **b. Tidak dapat, data tidak tersedia** **c. Ya, tetapi masih mentah dan harus diolah lebih lanjut** **d. Belum, butuh proses/koordinasi panjang dengan SKPD lain**
6	**Apakah saat ini ada rapat koordinasi rutin (mingguan, bulanan, dll) terkait TPB yang harus PD Bapak/Ibu hadiri, dan jika ada, siapa yang mengundang?** Rapat koordinasi oleh Bappelitbangda
7	**Apa saja kendala yang dihadapi oleh PD Bapak/Ibu sekalian dalam pemenuhan data capaian kinerja TPB (yang diminta oleh Litbang KBB)?** Data Patroli yg dilaksanakan oleh Satpol PP adalah Patroli gangguan trantibumlinmas dan pelanggaran Perda, bukan patroli pidana kejahatan thd nyawa

bappelitbangda

Kuesioner Singkat - TPB KBB

Kuesioner ini disusun oleh Konsultan dalam rangka analisis dalam kegiatan "Kajian Strategi Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" di Bapelitbangda KBB. Mengingat pentingnya kuesioner ini, mohon bantuannya agar diisi selambat-lambatnya pada hari JUMAT, 29 Oktober 2021. Terima kasih.

1	**NAMA PD, PENGISI, NO HP.** Dinas sosial, Ezra, 08986866204
2	**Apakah PD Bapak/Ibu sudah memahami peran, tugas maupun kontribusi yang harus dijalankan dalam rangka pencapaian target TPB? (Jika jawaban 'Belum', harap berikan alasan)** **Sudah**
3	**JIKA ADA, mohon disebutkan 1 atau 2 saja program pembangunan (dalam hal ini program yang kaitannya dalam rangka pencapaian target TPB) yang sedang/sudah dilaksanakan oleh PD Bapak/Ibu** **KUBE**
4	**Apakah ada semacam penugasan atau pendelegasian tugas secara resmi dari Kepala Daerah (Kabupaten) atau Provinsi, terhadap PD Bapak/ibu, untuk melaksanakan program-program untuk menunjang pencapaian TPB?** **Ada**
5	**Dalam hal permintaan data-data capaian TPB tahun 2018-2021 yang diminta oleh Litbang KBB, apakah PD Bapak/Ibu dapat memenuhinya? (Pilih salah satu)** **a. Ya, dapat** **b. Tidak dapat, data tidak tersedia** **c. Ya, tetapi masih mentah dan harus diolah lebih lanjut** **d. Belum, butuh proses/koordinasi panjang dengan SKPD lain**
6	**Apakah saat ini ada rapat koordinasi rutin (mingguan, bulanan, dll) terkait TPB yang harus PD Bapak/Ibu hadiri, dan jika ada, siapa yang mengundang?** **Tidak ada**
7	**Apa saja kendala yang dihadapi oleh PD Bapak/Ibu sekalian dalam pemenuhan data capaian kinerja TPB (yang diminta oleh Litbang KBB)?** Kesesuaian data yang diperlukan dan koordinasi dalam pengumpulan data

bappelitbangda

Kuesioner Singkat - TPB KBB

Kuesioner ini disusun oleh Konsultan dalam rangka analisis dalam kegiatan "Kajian Strategi Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" di Bapelitbangda KBB. Mengingat pentingnya kuesioner ini, mohon bantuannya agar diisi selambat-lambatnya pada hari JUMAT, 29 Oktober 2021. Terima kasih.

1	**NAMA PD, PENGISI, NO HP.** Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Decky Setiadi, 082115494971
2	**Apakah PD Bapak/Ibu sudah memahami peran, tugas maupun kontribusi yang harus dijalankan dalam rangka pencapaian target TPB? (Jika jawaban 'Belum', harap berikan alasan)** **Ya**
3	**JIKA ADA, mohon disebutkan 1 atau 2 saja program pembangunan (dalam hal ini program yang kaitannya dalam rangka pencapaian target TPB) yang sedang/sudah dilaksanakan oleh PD Bapak/Ibu** Program Perencanaan dan Pembangunan Industri,
4	**Apakah ada semacam penugasan atau pendelegasian tugas secara resmi dari Kepala Daerah (Kabupaten) atau Provinsi, terhadap PD Bapak/ibu, untuk melaksanakan program-program untuk menunjang pencapaian TPB?** **Ya**
5	**Dalam hal permintaan data-data capaian TPB tahun 2018-2021 yang diminta oleh Litbang KBB, apakah PD Bapak/Ibu dapat memenuhinya? (Pilih salah satu)** **a. Ya, dapat** **b. Tidak dapat, data tidak tersedia** **c. Ya, tetapi masih mentah dan harus diolah lebih lanjut** **d. Belum, butuh proses/koordinasi panjang dengan SKPD lain**
6	**Apakah saat ini ada rapat koordinasi rutin (mingguan, bulanan, dll) terkait TPB yang harus PD Bapak/Ibu hadiri, dan jika ada, siapa yang mengundang?** **Tidak**
7	**Apa saja kendala yang dihadapi oleh PD Bapak/Ibu sekalian dalam pemenuhan data capaian kinerja TPB (yang diminta oleh Litbang KBB)?** Proses pengolahan data karena masih kontinuitas harus dilakukan pembaharuan data

bappelitbangda

Kuesioner Singkat - TPB KBB

Kuesioner ini disusun oleh Konsultan dalam rangka analisis dalam kegiatan "Kajian Strategi Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" di Bapelitbangda KBB. Mengingat pentingnya kuesioner ini, mohon bantuannya agar diisi selambat-lambatnya pada hari JUMAT, 29 Oktober 2021. Terima kasih.

1	**NAMA PD, PENGISI, NO HP.** **DLH, Sabar**
2	**Apakah PD Bapak/Ibu sudah memahami peran, tugas maupun kontribusi yang harus dijalankan dalam rangka pencapaian target TPB? (Jika jawaban 'Belum', harap berikan alasan)** **Paham**
3	**JIKA ADA, mohon disebutkan 1 atau 2 saja program pembangunan (dalam hal ini program yang kaitannya dalam rangka pencapaian target TPB) yang sedang/sudah dilaksanakan oleh PD Bapak/Ibu** PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP; PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3); PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH); PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
4	**Apakah ada semacam penugasan atau pendelegasian tugas secara resmi dari Kepala Daerah (Kabupaten) atau Provinsi, terhadap PD Bapak/ibu, untuk melaksanakan program-program untuk menunjang pencapaian TPB?** **Tidak ada**
5	**Dalam hal permintaan data-data capaian TPB tahun 2018-2021 yang diminta oleh Litbang KBB, apakah PD Bapak/Ibu dapat memenuhinya? (Pilih salah satu)** **a. Ya, dapat** **b. Tidak dapat, data tidak tersedia** **c. Ya, tetapi masih mentah dan harus diolah lebih lanjut** **d. Belum, butuh proses/koordinasi panjang dengan SKPD lain**
6	**Apakah saat ini ada rapat koordinasi rutin (mingguan, bulanan, dll) terkait TPB yang harus PD Bapak/Ibu hadiri, dan jika ada, siapa yang mengundang?** **Tidak ada**
7	**Apa saja kendala yang dihadapi oleh PD Bapak/Ibu sekalian dalam pemenuhan data capaian kinerja TPB (yang diminta oleh Litbang KBB)?** Sebagian Indikator2 SDG terkait pilar Lingkungan, belum bisa langsung diketahui/ada di/oleh DLH (harus diolah dengan dukungan data2 lainnya bahkan berkaitan dg PD lain), karena indikator2 dalam renstra DLH merupakan indikator2 yang notabene merupakan irisan dalam mendukung pencapaian indikator2 SDG, citarum harum, rpjmn, rpjmd, target dan tuj provinsi,

bappelitbangda

Kuesioner Singkat - TPB KBB

Kuesioner ini disusun oleh Konsultan dalam rangka analisis dalam kegiatan "Kajian Strategi Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" di Bapelitbangda KBB. Mengingat pentingnya kuesioner ini, mohon bantuannya agar diisi selambat-lambatnya pada hari JUMAT, 29 Oktober 2021. Terima kasih.

1	**NAMA PD, PENGISI, NO HP.** DISNAKER, Dian Nurhandayati.SIP. 08121405465
2	**Apakah PD Bapak/Ibu sudah memahami peran, tugas maupun kontribusi yang harus dijalankan dalam rangka pencapaian target TPB? (Jika jawaban 'Belum', harap berikan alasan)** Belum memahami, karena baru mengikuti kegiatan ini kaitan dengan rotasi jabatan dan baru menjabat selama 5 bulan, tetapi setelah berkoordinasi bahwa keterkaitan RPJMD dan Renstra Disnaker ada di Misi 2 yaitu mewujudkan Agroindustri dan Pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan berkelanjutan dan berdaya saing, yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan sasaran meningkatkan partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada.
3	**JIKA ADA, mohon disebutkan 1 atau 2 saja program pembangunan (dalam hal ini program yang kaitannya dalam rangka pencapaian target TPB) yang sedang/sudah dilaksanakan oleh PD Bapak/Ibu** 1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Hubungan Industrial
4	**Apakah ada semacam penugasan atau pendelegasian tugas secara resmi dari Kepala Daerah (Kabupaten) atau Provinsi, terhadap PD Bapak/ibu, untuk melaksanakan program-program untuk menunjang pencapaian TPB?** **Belum ada**
5	**Dalam hal permintaan data-data capaian TPB tahun 2018-2021 yang diminta oleh Litbang KBB, apakah PD Bapak/Ibu dapat memenuhinya? (Pilih salah satu)** **a. Ya, dapat** **b. Tidak dapat, data tidak tersedia** **c. Ya, tetapi masih mentah dan harus diolah lebih lanjut** **d. Belum, butuh proses/koordinasi panjang dengan SKPD lain**
6	**Apakah saat ini ada rapat koordinasi rutin (mingguan, bulanan, dll) terkait TPB yang harus PD Bapak/Ibu hadiri, dan jika ada, siapa yang mengundang?** **Belum ada**
7	**Apa saja kendala yang dihadapi oleh PD Bapak/Ibu sekalian dalam pemenuhan data capaian kinerja TPB (yang diminta oleh Litbang KBB)?** Belum memahami indikator pelaksanaan program dan pencapaian indikator program sehingga butuh waktu unutk sosialisasi kembali.

bappelitbangda

Kuesioner Singkat - TPB KBB

Kuesioner ini disusun oleh Konsultan dalam rangka analisis dalam kegiatan "Kajian Strategi Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" di Bapelitbangda KBB. Mengingat pentingnya kuesioner ini, mohon bantuannya agar diisi selambat-lambatnya pada hari JUMAT, 29 Oktober 2021. Terima kasih.

1	**NAMA PD, PENGISI, NO HP.** dinas ketahanan pangan dan pertanian
2	**Apakah PD Bapak/Ibu sudah memahami peran, tugas maupun kontribusi yang harus dijalankan dalam rangka pencapaian target TPB? (Jika jawaban 'Belum', harap berikan alasan)** belum sepenuhnya memahami terkait target yg harus dicapai....perlu dilakukan reviu yang berulang terkait indikator dari target yang ditetapkan karena banyak sekali indikator yang harus diisi tetapi mungkin tidak masuk pada target pembangunan berkelanjutan.
3	**JIKA ADA, mohon disebutkan 1 atau 2 saja program pembangunan (dalam hal ini program yang kaitannya dalam rangka pencapaian target TPB) yang sedang/sudah dilaksanakan oleh PD Bapak/Ibu** target TPB nya belum tau...jd belum bisa memberi jawaban
4	**Apakah ada semacam penugasan atau pendelegasian tugas secara resmi dari Kepala Daerah (Kabupaten) atau Provinsi, terhadap PD Bapak/ibu, untuk melaksanakan program-program untuk menunjang pencapaian TPB?** tidak hanya disposisi biasa
5	**Dalam hal permintaan data-data capaian TPB tahun 2018-2021 yang diminta oleh Litbang KBB, apakah PD Bapak/Ibu dapat memenuhinya? (Pilih salah satu)** **a. Ya, dapat** **b. Tidak dapat, data tidak tersedia** **c. Ya, tetapi masih mentah dan harus diolah lebih lanjut** **d. Belum, butuh proses/koordinasi panjang dengan SKPD lain**
6	**Apakah saat ini ada rapat koordinasi rutin (mingguan, bulanan, dll) terkait TPB yang harus PD Bapak/Ibu hadiri, dan jika ada, siapa yang mengundang?** ya....bappelitbangda
7	**Apa saja kendala yang dihadapi oleh PD Bapak/Ibu sekalian dalam pemenuhan data capaian kinerja TPB (yang diminta oleh Litbang KBB)?** permohonan data yang mendadak sedangkan data ada di bidang teknis

bappelitbangda

Kuesioner Singkat - TPB KBB

Kuesioner ini disusun oleh Konsultan dalam rangka analisis dalam kegiatan "Kajian Strategi Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" di Bapelitbangda KBB. Mengingat pentingnya kuesioner ini, mohon bantuannya agar diisi selambat-lambatnya pada hari JUMAT, 29 Oktober 2021. Terima kasih.

1	**NAMA PD, PENGISI, NO HP.** Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	**Apakah PD Bapak/Ibu sudah memahami peran, tugas maupun kontribusi yang harus dijalankan dalam rangka pencapaian target TPB? (Jika jawaban 'Belum', harap berikan alasan)** belum, belum mengetahui target TPB
3	**JIKA ADA, mohon disebutkan 1 atau 2 saja program pembangunan (dalam hal ini program yang kaitannya dalam rangka pencapaian target TPB) yang sedang/sudah dilaksanakan oleh PD Bapak/Ibu** -
4	**Apakah ada semacam penugasan atau pendelegasian tugas secara resmi dari Kepala Daerah (Kabupaten) atau Provinsi, terhadap PD Bapak/ibu, untuk melaksanakan program-program untuk menunjang pencapaian TPB?** **Tidak tahu**
5	**Dalam hal permintaan data-data capaian TPB tahun 2018-2021 yang diminta oleh Litbang KBB, apakah PD Bapak/Ibu dapat memenuhinya? (Pilih salah satu)** **a. Ya, dapat** **b. Tidak dapat, data tidak tersedia** **c. Ya, tetapi masih mentah dan harus diolah lebih lanjut** **d. Belum, butuh proses/koordinasi panjang dengan SKPD lain**
6	**Apakah saat ini ada rapat koordinasi rutin (mingguan, bulanan, dll) terkait TPB yang harus PD Bapak/Ibu hadiri, dan jika ada, siapa yang mengundang?** **Tidak ada**
7	**Apa saja kendala yang dihadapi oleh PD Bapak/Ibu sekalian dalam pemenuhan data capaian kinerja TPB (yang diminta oleh Litbang KBB)?** -

bappelitbangda

Kuesioner Singkat - TPB KBB

Kuesioner ini disusun oleh Konsultan dalam rangka analisis dalam kegiatan "Kajian Strategi Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" di Bapelitbangda KBB. Mengingat pentingnya kuesioner ini, mohon bantuannya agar diisi selambat-lambatnya pada hari JUMAT, 29 Oktober 2021. Terima kasih.

1	**NAMA PD, PENGISI, NO HP.** Dinas Kesehatan, Irvan Indrasukma dan 081320918833
2	**Apakah PD Bapak/Ibu sudah memahami peran, tugas maupun kontribusi yang harus dijalankan dalam rangka pencapaian target TPB? (Jika jawaban 'Belum', harap berikan alasan)** **Memahami**
3	**JIKA ADA, mohon disebutkan 1 atau 2 saja program pembangunan (dalam hal ini program yang kaitannya dalam rangka pencapaian target TPB) yang sedang/sudah dilaksanakan oleh PD Bapak/Ibu** SDG'S dan jaminan kesehatan nasional
4	**Apakah ada semacam penugasan atau pendelegasian tugas secara resmi dari Kepala Daerah (Kabupaten) atau Provinsi, terhadap PD Bapak/ibu, untuk melaksanakan program-program untuk menunjang pencapaian TPB?** **ada**
5	**Dalam hal permintaan data-data capaian TPB tahun 2018-2021 yang diminta oleh Litbang KBB, apakah PD Bapak/Ibu dapat memenuhinya? (Pilih salah satu)** **a. Ya, dapat** **b. Tidak dapat, data tidak tersedia** **c. Ya, tetapi masih mentah dan harus diolah lebih lanjut** **d. Belum, butuh proses/koordinasi panjang dengan SKPD lain**
6	**Apakah saat ini ada rapat koordinasi rutin (mingguan, bulanan, dll) terkait TPB yang harus PD Bapak/Ibu hadiri, dan jika ada, siapa yang mengundang?** **ada, yang mengundak bidang tersebut**
7	**Apa saja kendala yang dihadapi oleh PD Bapak/Ibu sekalian dalam pemenuhan data capaian kinerja TPB (yang diminta oleh Litbang KBB)?** data yang sedang di olah

bapelitbangda

LAMPIRAN III - REKAPITULASI DATA CAPAIAN TPB KBB S/D TAHUN 2020

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	Menurun menjadi 7-8%	11,71	11,49	10,06	9,38		Belum mencapai target (Teknokratis)		A.1.AKM.7	1. Program bantuan bidang pendidikan 2. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 3. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 4. Program peningkatan kesempatan kerja 5. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 6. Program transmigrasi regional 7. Program pemberdayaan fakir miskin	1. Persentase siswa SD/SMP penerima BOS 2. Persentase penduduk miskin yang menerima bantuan iuran 3. Persentase pencari kerja dilatih yang bekerja 4. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 5. Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 6. Jumlah transmigrasi yang ditempatkan	sosial	**Dinsos**
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	Meningkat menjadi 95%		70%			Belum mencapai target	Jaminan kesehatan penduduk/jumlah penduduk Sumber: Profil Kesehatan Dinkes		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin yang menerima bantuan iuran	kesehatan	**Dinkes**
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal		70%			Belum mencapai target		A.2.UWND.1.5	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Kasus Yang Diselesaikan dengan PB	tenaga kerja	**Disnaker**
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Disesuaikan dengan SPM Sosial	Meningkat menjadi 17,12%						Tidak ada data	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga Sumber: SPM Bidang Sosial	A.2.UWD.6.9	Program pembinaan para penyadang cacat dan trauma	Persentase penyandang disabilitas yang berfungsi secara fisik	sosial	**Dinsos**
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	Menurun menjadi 2,8 juta		n/a	8,32%	13,08%		Belum mencapai target (Statistik Kesejahteraan Rakyat KBB 2017,2018,2019)	Persentase rumah tangga yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung	A.2.UWD.6.1	Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase KFM yang meningkat produktifitasnya secara sosial ekonomi	sosial	**Dinsos**
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%	Meningkat menjadi 70%		26,988	27,634	28,511		Belum mencapai target		A.2.UWD.2.12			kesehatan	**Dinkes**
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.	Meningkat menjadi 63%.				93,00%		**Mencapai Target (Teknokratis)**	Universal Child Immunization (UCI) Desa di Kabupaten Bandung Sumber: Profil Kesehatan 2019	A.2.UWD.2.13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Indikator Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang mencapai target, Pelayanan Kesehatan orang dengan TB, Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinveksi HIV	kesehatan	**Dinkes**
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Meningkat menjadi 65%		CU/PUS	82,80%	CU/PUS		**Mencapai Target**	Cakupan Peserta KB Aktif terhadap PUS Sumber: Profil Kesehatan 2019	A.2.UWND.8.10	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah peserta KB baru	kesehatan, PPKB	**Dinkes, DP2KBP3A**

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Meningkat menjadi 100%		59.76%, **62,11%** (Rispam)	70,46%	78,80%		Belum mencapai target (Statistik Kesejahteraan Rakyat KBB 2017,2018,2019), RISPAM Th 2017		A.2.UWD.3.1.15	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terbangun	pekerjaan umum & penataan ruang	**Disperkimtan,DPUTR**
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Meningkat menjadi 100%			47,40%	59,47%		Belum mencapai target (Teknokratis)		A.2.UWD.3.1.7	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (instalasi pengolahan air limbah domestik)	pekerjaan umum & penataan ruang	**Disperkimtan,DPUTR**
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	Meningkat menjadi 94,78%	97,12	96,76	97,55	97,76		**Telah Mencapai Target**	Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, Makro Sosial	A.2.UWD.1.4.1	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	APK/APM SD	pendidikan	**Disdik**
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	Meningkat menjadi 82,2%	91,27	83,00	88,34	77,95		Belum mencapai target	Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat	A.2.UWD.1.4.2	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	APK/APM SMP	pendidikan	**Disdik**
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	Meningkat menjadi 77,4%.			24%	95%		**Mencapai Target (Teknokratis)**	*Persentase penduduk usia 0-18 tahun *Terkendala data mengenai penduduk berpendapatan bawah (data tidak tersedia)	A.2.UWND.6.7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan / Kepemilikan Akta kelahiran usia 0-18 Tahun (IKU)	administrasi kependudukan & catatan sipil	**Disdukcapil**
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019.	Meningkat menjadi 100%		100%	100,00%			**Mencapai Target (Statistik Kesejahteraan Rakyat KBB 2017,2018)**	Rasio elektrifikasi rumah tangga miskin Sumber: BDT	A.2.UP.4.1			energi & sumber daya mineral	**Disperindag**
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		2164	1976	4222		Belum mencapai target	Pada tahun 2019, peningkatan signifikan terjadi pada jumlah korban banjir yang terdampak dan mengungsi		Program penanganan darurat kebencanaan	Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	**BPBD**
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	Meningkat menjadi 39 daerah						Tidak ada data			Penyediaan Tempat Tinggal Sementara bagi Pengungsi Rumah Roboh/Rusak Berat, Dilengkapi dengan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah pembangunan tempat tinggal sementara	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	**BPBD**
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Meningkat menjadi 151 ribu						Tidak ada data		A.2.UWD.6.7	1. Program penanganan darurat kebencanaan 2. Pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana 3. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, air bersih dan sanitasi	1. Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi 2. Jumlah pengadaan kebutuhan dasar pangan 3. Tersedianya bahan kebutuhan sandang dan pangan	sosial, trantiblinmas	**Dinsos, BPBD**

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).	Meningkat menjadi 81,5 ribu						Tidak ada data	Persentase korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai	A.2.UWD.6.7	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang mampu menghadapi situasi kritis termasuk korban bencana	sosial	**Dinsos**
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4).	Menurun menjadi 118,6						Tidak ada data	Dokumen IRBI yang dikeluarkan BNPB berdasarkan jumlah keseluruhan jenis bencana yang ada di wilayah masing -		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	Persentase Pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	**BPBD**
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun						Tidak ada data					ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	**BPBD**
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	2	0	1		Ada	Telah mencapai target	Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Bandung Barat Tahun...		Progaram pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	Persentase Pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	**BPBD, Bappeda**
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		49,64%	44,28%	50,84%	43.949.442.716	Telah mencapai target (Statistik Kesejahteraan Rakyat KBB 2017,2018,2019)	Pagu anggaran untuk Prioritas 3 - Penanggulangan kemiskinan dan PMKS		1. Program bantuan bidang pendidikan 2. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 3. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 4. Program peningkatan kesempatan kerja 5. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 6. Program transmigrasi regional 7. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 8. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 9. Program pembinaan anak terlantar 10. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 11. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo 12. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya) 13. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	1. Persentase siswa SD/SMP penerima BOS 2. Persentase penduduk miskin yang menerima bantuan iuran 3. Persentase pencari kerja dilatih yang bekerja 4. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 5. Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 6. Jumlah transmigrasi yang ditempatkan 7. Persentase KFM yang meningkat produktifitasnya secara sosial ekonomi 8. Persentase PMKS yang mampu menghadapi situasi kritis termasuk korban bencana 9. Persentase anak yang meningkat kemampuanya dalam pemenuhan kebutuhan dasar 10. Persentase penyandang disabilitas yang berfungsi secara fisik 11. Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial 12. Persentase PMKS yang mampu berintegrasi sosial 13. Persentase PSKS yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	sosial	**Dinsos**
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat						Tidak ada data	Proporsi belanja pemerintah daerah untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan sosial) disesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian permasalahan daerah	A.2.PU.2.5; A.2.PU.2.6	Semua program di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial		sosial	**Dinsos**
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun						Tidak ada data		A.2.UWD.2.15			pangan	Dispangkan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).	Menurun menjadi 17%		4,68%	4,58%	5,35%		**Mencapai Target**	Prevalensi Balita dengan Status Gizi Kurang Sumber: Profil Kesehatan 2019 dan 2018	A.1.AKM.15	Program Perbaikan Gizi Masyrakat	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	kesehatan	Dinkes
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun						Tidak ada data	Jumlah desa prioritas 1 dan prioritas 2 (desa yang cenderung mengalami kerawanan pangan)	A.1.AKM.30	Program peningkatan ketersediaan dan akses pangan masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	pangan	Dispangkan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).	Menurun menjadi 8,5 %		13,84%	6,57%	5,08%		**Mencapai Target (Statistik Kesejahteraan Rakyat KBB 2017,2018,2019)**		A.2.UWD.2.15			pangan	Dispangkan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	0,66%	0,74%	0,92%	0,95%		Belum mencapai target (Teknokratis)			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	kesehatan	Dinkes
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).	Menurun menjadi 28%		7,67%	7,22%	7,60%		**Mencapai Target**			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	kesehatan	Dinkes
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		0,03%	0,012	0,02%		**Mencapai Target**	Mulai mengalami penurunan sejak tahun 20018	A.1.AKM.14/15	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	kesehatan	Dinkes
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).	Menurun menjadi 28%		5,14%	5,19%	9,71%		**Mencapai Target**					kesehatan	Dinkes
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).	Meningkat menjadi 50%		70,5%	71,6%	72,2%		**Mencapai Target**					kesehatan	Dinkes
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun			84,60%	88,73%		Belum mencapai target (Teknokratis)	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	A.2.UP.8.2	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Cakupan bina kelompok perikanan	pangan	Dispangkan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat						Tidak ada data	PDRB sektor pertanian dibagi jumlah tenaga kerja sektor pertanian				tenaga kerja	Disnaker
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	Menurun menjadi 306		127	127,4			**Telah mencapai target**	Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Dinkes	A.2.UWD.2.5.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	AKB (Ankga Kematian Bayi)	kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	Meningkat menjadi 95%						Tidak ada ada		A.2.UWD.2.12	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	AKB (Ankga Kematian Bayi)	kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	Meningkat menjadi 85 %		71,89%	89,85%			**Telah mencapai target (Statistik Kesejahteraan Rakyat KBB 2017,2018)**		A.2.UWD.2.12	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	AKB (Ankga Kematian Bayi)	kesehatan	**Dinkes**

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		4,15	0,4			**Telah mencapai target**		A.2.UWD.2.3	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Presentase Yankes Balita	kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		4,05	4,6			**Telah mencapai target**	Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Dinkes	A.2.UWD.2.4	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	AKB (Ankga Kematian Bayi)	kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	Menurun menjadi 24		4,11	0,2			**Telah mencapai target**	Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Dinkes	A.2.UWD.2.1	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	AKB (Ankga Kematian Bayi)	kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	Meningkat menjadi 95%		85,90%	89%			**Belum mencapai target**		A.2.UWD.2.13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Indikator Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang mencapai target, Pelayanan Kesehatan orang dengan TB, Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinveksi HIV	kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	Menurun menjadi <0,5%		18	39			Telah mencapai target	Jumlah penderita HIV dan IMS Sumber: Profil Kesehatan	A.2.UWD.2.3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Indikator Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang mencapai target, Pelayanan Kesehatan orang dengan TB, Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinveksi HIV	kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	Menurun menjadi 245		42,17%	27,40%			Belum mencapai target	CNR seluruh kasus TBC Sumber: Profil Kesehatan Dinkes Nilainya mengalami peningkatan tetapi masih di bawah target	A.2.UWD.2.20	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Indikator Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang mencapai target, Pelayanan Kesehatan orang dengan TB, Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinveksi HIV	kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		110				**telah mencapai target (KBB dalam angka 2018)**		A.2.UWD.2.26	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Indikator Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang mencapai target, Pelayanan Kesehatan orang dengan TB, Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinveksi HIV	kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	Meningkat menjadi 300						Tidak ada ada			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Indikator Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang mencapai target, Pelayanan Kesehatan orang dengan TB, Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinveksi HIV	kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		1	5			Belum mencapai target	Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Dinkes				kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.	Meningkat menjadi 35.					Ada	Tidak ada ada	Sudah menerima sertifikasi eliminasi tahun 2018				kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).	Menurun menjadi 5,4%		33,93		36,18		Belum mencapai target (Statistik Kesejahteraan Rakyat KBB 2017,2019)					kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	Menurun menjadi 24,3%		14%	11,60%			**telah mencapai target**	Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Dinkes dan Riskesdas				kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).	Menurun		6,60%	4%			**telah mencapai target**	Sumber: Profil Kesehatan Provinsi		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Yankes penderita hipertansi, Yankes Penderita Diabetes Melitus, Yankes dengan orang gangguang jiwa berat, yankes pada usia produktif, yankes pada usia pendidikan dasar	kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun						Tidak ada ada					kesehatan	**Dinkes**

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).	Meningkat menjadi 280		41	41			**Belum mencapai target (KBB dalam Angka 2019)**					kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).	Menurun menjadi angka 0,02%						Tidak ada ada					kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		Angka Prevalensi tingkat Provinsi Jawa Barat 1.83%	Angka Prevalensi Pakai Narkoba Setahun Terakhir di 13 tbukota Provinsi pada kelompok pekerja didapatkan bahwa Jawa Barat sebesar 5,50 % dengan rincian yaitu coba pakai 2,00 %, Teratur 3%, Pecandu 0,25 %, Narkoba suntik	Angka prevalensi penyalahguna narkoba di 34 provinsi, angkanya belum ada tetapi BNN RI sudah membuat grafik prevalensi penyalahguna narkoba		Tidak ada ada					**kesehatan**	Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	Meningkat menjadi 66%			73,2%	73,4%		**telah mencapai target (Teknokratis)**			Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah peserta KB baru	kesehatan, PPKB	**Dinkes, DP2KBP3A**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Meningkat menjadi 65%					80,5%			A.2.UWND.8.10	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah peserta KB baru	kesehatan, PPKB	**Dinkes, DP2KBP3A**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	Meningkat menjadi 23,5%		16.05%, 73,63	77,8%			**Belum mencapai target (Statistik Kesejahteraan Rakyat KBB 2017)**		A.2.UWND.8.14	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah peserta KB baru	kesehatan, PPKB	**Dinkes, DP2KBP3A**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).	Menurun menjadi 38		5,57	5,69	5,65		**Telah Mencapai Target**		A.2.UWND.8.11	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah peserta KB baru	kesehatan, PPKB	**Dinkes, DP2KBP3A**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).	Menurun menjadi 2,28			2,03	2,47		**Belum mencapai target**	Dikarenakan menurunnya pemakaian alat kontrasepsi meodern serta kurang diminatinya alat kontrasepsi jangka panjang	A.2.UWND.8.2	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah peserta KB baru	kesehatan, PPKB	**Dinkes, DP2KBP3A**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	Menurun menjadi 9,91%		11,573	10,222	12,073		**Telah mecapai target**					kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		1194	1137	1266		**Telah mecapai target**	Jaminan kesehatan penduduk/jumlah penduduk Sumber: Profil Kesehatan Dinkes		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin yang menerima bantuan iuran	kesehatan	**Dinkes**

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	Meningkat menjadi minimal 95%			74,02	79,05	76,64	Belum mencapai target	Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Sumber: Profil Kesehatan Dinkes		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin yang menerima bantuan iuran	kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,9	Pada tahun 2030, secara signifikan menguranggi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun						Tidak ada ada					kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		34%		36,18%		Belum mencapai target (Statistik Kesejahteraan Rakyat KBB 2017, 2019)	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat				kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		100%	100%	100%		**Telah mencapai target**					kesehatan	**Dinkes**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat						Tidak ada ada	Rasio tenaga medis per satuan penduduk Sumber: Profil Kesehatan Dinkes	A.2.UWD.2.10			kesehatan	**Dinkes**
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	100	100	100	100		Tidak ada data					pendidikan	**Disdik**
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).	Meningkat menjadi 84,2%	58,47	79,27	86,82	95,37		**Telah mencapai target**	data dari neraca pendidikan daerah		program manajemen pelayanan pendidikan	dokumen kelembagaan	pendidikan	**Disdik**
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	Meningkat menjadi 81%	47,28	68,08	75,63	84,18		**Telah mencapai target**	data dari neraca pendidikan daerah		program manajemen pelayanan pendidikan	dokumen kelembagaan	pendidikan	**Disdik**
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	Meningkat menjadi 114,09%		107,34	103,94	104,22		Belum mencapai target	data dari BPS	A.2.UWD.1.2	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	APK/APM SD	pendidikan	**Disdik**
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	Meningkat menjadi 106,94%		87,55	93,88	90,66		Belum mencapai target	data dari BPS	A.2.UWD.1.2	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	APK/APM SMP	pendidikan	**Disdik**
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	Meningkat menjadi 8,8 tahun	9,14	9,18	7,82	8,14		Belum mencapai target	data dari neraca pendidikan daerah	A.1.AKM.12	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	APK/APM SMP	pendidikan	**Disdik**

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	Meningkat menjadi 77,2%	64,8	47,23	37,88	34,73		Belum mencapai target	data dari neraca pendidikan daerah	A.2.UWD.1.2	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	APK/APM SMP	pendidikan	**Disdik**
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		43,78%		68,79%		Telah mencapai target (Statistik Kesejahteraan Rakyat KBB 2017,2019)	Sumber data: Disnaker	A.2.UWND.1.9	Program Peningkatan Kualiras dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja dilatih yang Bekerja	tenaga kerja	**Disnaker**
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. 4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.	Meningkat		95,08	86,18	93,47		Telah mencapai target	Laki/Perempuan data dari BPS meningkat sejak tahun 2018	A.2.UWD.1.4.1; A.2.UWD.1.4.2; A.2.UWD.1.4.3	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	APK/APM SMP	pendidikan	**Disdik**
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	Meningkat menjadi 96,1%		95,08%	95,08%	95,08%		Belum mencapai target	data dari BPS	A.2.UWD.1.18	PNF	AMH	pendidikan	**Disdik**
					4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.				98,65	99,03	98,26								
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	78,1	81,6	86,1	93,1		Tidak ada data					pendidikan	**Disdik**
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	39,6	40,4	40,5	42,1		**Telah mencapai target**	data dari neraca pendidikan daerah meningkat untuk urusan pendidikan dasar (TK, SD, SMP)		program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	presentase sertifikasi pendidik	pendidikan	**Disdik**
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).	bertambah sebanyak 16		3	3	3		Belum mencapai target			Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan tentang PUG, lomba penyuluhan KDRT dan gelar produk PEKKA	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	**DP2KBP3A**
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun			8%	6%		Belum mencapai target	Nilainya mengalami peningkatan dikarenakan adanya perbaikan pelayanan dan kesadaran masyarakat yang menyebabkan meningkatnya jumlah laporan kekerasan	A.2.UWND.2.4	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	Jumlah Terbentuknya lembaga P2TP2A di setiap Kecamatan	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	**DP2KBP3A**

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).	Menurun menjadi kurang dari 20,48%		0,013	0,036	0,05	42,2%	Telah mencapai target	Nilainya mengalami peningkatan dikarenakan adanya perbaikan pelayanan dan kesadaran masyarakat yang menyebabkan meningkatnya jumlah laporan kekerasan		Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	Jumlah Terbentuknya lembaga P2TP2A di setiap Kecamatan	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	**DP2KBP3A**
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		17%	8%	27%		Belum mencapai target	Nilainya mengalami peningkatan dikarenakan adanya perbaikan pelayanan dan kesadaran masyarakat yang menyebabkan meningkatnya jumlah laporan kekerasan		Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	Jumlah Terbentuknya lembaga P2TP2A di setiap Kecamatan	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	**DP2KBP3A**
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).	Meningkat menjadi 70%		100%	100%	100%		Telah mencapai target		A.2.UWND.2.7	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	Jumlah Terbentuknya lembaga P2TP2A di setiap Kecamatan	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	**DP2KBP3A**
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		34,01%				Belum mencapai target (Statistik Kesejahteraan Rakyat KBB 2017)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	A.2.UWND.8.12			pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	**DP2KBP3A**
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).	Meningkat menjadi 21 tahun		18,95	18,95	18,95		Belum mencapai target		A.2.UWND.8.30	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Jumlah kelompok remaja yang mendapat pembekalan mengenai kesehatan reproduksi remaja	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	**DP2KBP3A**
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).	Menurun menjadi 38 tahun		458	494	490		Tidak ada Data		A.2.UWND.8.11	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Jumlah kelompok remaja yang mendapat pembekalan mengenai kesehatan reproduksi remaja	PPKB	**DP2KBP3A**
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	Meningkat		12,00%		12,00%		**Belum mencapai target (Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2018, 2020)**	Hasil Pemilu 2014: ..% Hasil Pemilu 2019: ....%	A.2.UWND.2.2	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan tentang PUG, lomba penyuluhan KDRT dan gelar produk PEKKA	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	**DP2KBP3A**
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Meningkat		0,13%	0,13%	0,48%		**Belum mencapai target (Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2019,2020)**					pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	**DP2KBP3A, BKPSDM**
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat						Tidak ada Data					pemberdayaan perempuan & perlindungan anak, PPKB	**DP2KBP3A**
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurunnya unmeet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).	Menurun menjadi 9,9%		10,07	10,93	10,16	9,90%	**Telah mencapai Target**	Masih memenuhi target nasional meskipun nilainya mengalami peningkatan *Data Oktober 2018 unmet need ...jiwa* *Jumlah PUS = ... jiwa*	A.2.UWND.8.13	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah peserta KB baru	kesehatan, PPKB	**Dinkes, DP2KBP3A**

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).	Meningkat menjadi 85%		72,27%	73,31%	73,38%		**Belum mencapai target**			Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah peserta KB baru	kesehatan, PPKB	**Dinkes, DP2KBP3A**
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		60,08%		68,79%		Telah mencapai target (Statistik Kesejahteraan Rakyat KBB 2017,2019)	Persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas menurut karakteristik penggunaan teknologi infotmasi selama tiga bulan terakhir Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat	A.2.UWND.10.3			komunikasi & informatika	**Diskominfo**
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Meningkat menjadi 100%		61,65%	61,75%	64,95%		**Belum mencapai target**		A.2.UWD.3.1.15	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terbangun	pekerjaan umum & penataan ruang	**Disperkimtan,DPUTR**
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik		76,45%	78%	79,05%		Tidak ada ada					pekerjaan umum & penataan ruang	**Disperkimtan,DPUTR**
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Meningkat menjadi 100%		61,65%	61,75%	65%		**Belum mencapai target**		A.2.UWD.3.1.15	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terbangun	pekerjaan umum & penataan ruang	**Disperkimtan,DPUTR**
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	73,00%					Telah mencapai target (Buku Putih Sanitasi)	Persentase Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) pada Rumah Tangga Sumber: LKIP Dinas Kesehatan				pekerjaan umum & penataan ruang	**Disperkimtan,DPUTR**
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Meningkat menjadi 100%			47,40%	59,47%		**Belum mencapai target**		A.2.UWD.3.1.7	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (instalasi pengolahan air limbah domestik)	pekerjaan umum & penataan ruang	**Disperkimtan,DPUTR**
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)		165	165	165		Telah mencapai target			Program pengembangan lingkungan sehat	Persentase desa/kel yang melaksanakan STBM	pekerjaan umum & penataan ruang	**Disperkimtan,DPUTR**
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		49	125	125		Telah mencapai target			Program pengembangan lingkungan sehat	Persentase desa/kel yang melaksanakan STBM	pekerjaan umum & penataan ruang	**Disperkimtan, DPUTR, Dinkes**
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Telah mencapai target	IPAL .... (skala kota), IPAL komunal		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (instalasi pengolahan air limbah domestik)	pekerjaan umum & penataan ruang	**DPUTR**
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	76,00%			76,33%		Telah mencapai target (Teknokratis&Buku Putih Sanitasi)	meningkat		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (instalasi pengolahan air limbah domestik)	pekerjaan umum & penataan ruang	**Disperkimtan, DPUTR**

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota.	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota					Ada	Telah mencapai target	IPLT .... (dibangun tahun ....) Tahun .... direncanakan rehabilitasi				pekerjaan umum & penataan ruang	**Disperkimtan, DPUTR**
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		38,25%	39,05%	38,18%		Telah mencapai target					pekerjaan umum & penataan ruang	**Disperkimtan, DPUTR**
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II.	Meningkat		-125,4	-29,5	40,26		Belum mencapai target	Perhitungan masih dengan stroken 2107 dan 2018 untuk 2019 menggunakan indeks kualitas air	A.2.UWND.5.6	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Nilai Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara 2. Persentase Penyediaan laporan pengujian kualitas air dan udara 3. Persentase data terkait lingkungan hidup yang dapat diakses	lingkungan hidup	**DLH**
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, ser-ta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture).	ada						Tidak ada data	Beberapa industri telah melakukan reuse dan recycle air limbah namun Pemda belum memberikan insentif ke industri yang telah melakukan reuse dan recycle limbah tersebut				lingkungan hidup	**DLH**
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada					Ada	Telah mencapai target					kehutanan, tata ruang	**Disperkimtan, DPUTR**
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai.	8 WS						Tidak ada data					pekerjaan umum & penataan ruang	**Disperkimtan, DPUTR**
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai	10 WS (skala nasional)		1 Wilayah sungai	1 Wilayah sungai	1 Wilayah sungai		Telah mencapai target	DAS dan Sub DAS tersebut di bawah pengelolaan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (FKPDAS)				kehutanan	**DPUTR**
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemang-ku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan ke-mampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.	ada		1 Kegiatan	1 Kegiatan	0		Telah mencapai target					lingkungan hidup	**DLH**
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	EKONOMI	7,2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019.	10-16%						Tidak ada ada	Persentase pemanfaatan energi panas bumi		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase pemanfaatan uap panas bumi yang dimanfaatkan	energi & sumber daya mineral	Disperindag

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		5,21	5,5	5,05		Belum mencapai target	Laju pertumbuhan PDRB per kapita harga berlaku (meningkat)	A.1.AKM.1			statistik	**BPS, Diskominfo**
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta		24.124.905	25.939.796	27.754.686		Belum mencapai target (Teknokratis)	PDRB per kapita harga berlaku (meningkat)	A.1.AKM.3			statistik	**BPS, Diskominfo**
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	Meningkat	7.522			8.684		Telah mencapai target (Teknokratis)		A.1.AKM.21			tenaga kerja	**Disnaker**
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat						Tidak ada data	Pekerja bebas di non pertanian				tenaga kerja	**Disnaker**
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).	51%	55,57	61,73%	61,34%	62,09%		Telah mencapai target (Teknokratis)					tenaga kerja	**Disnaker**
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat						Tidak ada data	Pekerja bebas di pertanian				tenaga kerja	**Disnaker**
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	25%						Tidak ada data					koperasi, usaha kecil, & menengah	**DiskopUKM**
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		10.285	11180	12080	19.620,47	Telah mencapai target	40 jam/ minggu				tenaga kerja	**Disnaker**
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		9,33%	8,50%	8,17%	5,11	Telah mencapai target (Teknokratis)		A.1.AKM.19	- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Peningkatan Kesempatan Kerja	- Prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan - Persentase pencari kerja dilatih yang bekerja	tenaga kerja	**Disnaker**

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	Meningkat						Tidak ada data	Persentase pencari kerja dilatih yang bekerja		Program Peningkatan Kualiras dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja dilatih yang Bekerja	tenaga kerja	**Disnaker**
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	Meningkat menjadi 8%						Tidak ada data	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	A.1.AKM.39	1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 3. Program Kemitraan 4. Program Pengembangan Nilai Budaya. 5 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 6 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan, 2. Jumlah Destinasi Wisata di kelola pemerintah yang siap kunjung, 3. Jumlah MOU Pengembangan dan Pembangunan Kepariwisataan, 4. Jumlah Lingkung Seni yang aktif. 5. Jumlah Situs Cagar Budaya yang dipelihara, 6. Jumlah Pagelaran Seni Budaya	pariwisata	**Disparbud**
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)				6.531.026		Telah mencapai target (Teknokratis)	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung	A.2.UP.1.1	1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 3. Program Kemitraan 4. Program Pengembangan Nilai Budaya. 5 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 6 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan, 2. Jumlah Destinasi Wisata di kelola pemerintah yang siap kunjung, 3. Jumlah MOU Pengembangan dan Pembangunan Kepariwisataan, 4. Jumlah Lingkung Seni yang aktif. 5. Jumlah Situs Cagar Budaya yang dipelihara, 6. Jumlah Pagelaran Seni Budaya	pariwisata	**Disparbud**
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat						Tidak ada data	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke objek wisata yang ada di kabupaten Bandung	A.2.UP.1.1	1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 3. Program Kemitraan 4. Program Pengembangan Nilai Budaya. 5 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 6 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan, 2. Jumlah Destinasi Wisata di kelola pemerintah yang siap kunjung, 3. Jumlah MOU Pengembangan dan Pembangunan Kepariwisataan, 4. Jumlah Lingkung Seni yang aktif. 5. Jumlah Situs Cagar Budaya yang dipelihara, 6. Jumlah Pagelaran Seni Budaya	pariwisata	**Disparbud**
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat						Tidak ada data	PAD sektor pariwisata Pemkab Bandung Sumber: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Tiket Masuk Situ Cileunca (sejak 2017), Tiket Masuk Gedong Budaya Sabilulungan (sejak 2018)	A.2.UP.1.3	1.Program Pemasaran Pariwisata, 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, 3. program Kemitraan	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan, 2. Jumlah Destinasi Wisata di kelola pemerintah yang siap kunjung, 3. Jumlah MOU Pengembangan dan Pembangunan Kepariwisataan	pariwisata	**Disparbud**
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		7242	12065	10680		Telah mencapai target	Jumlah tenaga kerja di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum				tenaga kerja	**Disnaker**
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat							Jumlah jaringan bank umum Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka				penanaman modal	**DPMPTSP, Diskominfo, DiskopUKM**
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	Menurun (mendekat)											penanaman modal	**DPMPTSP, Diskominfo**
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014: 820 km).	1000 Km (skala nasional)		26 KM	26 KM	26 KM		**Telah mencapai target**					perhubungan	Dishub

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019 (2014: 237).	Bertambah 3.258 km						Tidak ada data					perhubungan	Dishub
					9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.				1	1	1								
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	39,31	39,45	39,48			Telah mencapai target		A.1.AKM.42	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Persentase Laju Pertumbuhan sektor Perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bandung	perindustrian	Disperindag
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	8,127	8,179	8,305			Telah mencapai target	Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	A.1.AKM.42	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Persentase Laju Pertumbuhan sektor Perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bandung	perindustrian	Disperindag
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat						Tidak ada data					tenaga kerja	Disnaker
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat						Tidak ada data			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan IKM Berdaya Saing	perindustrian	Disperindag
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat						Tidak ada data	Persentase IKM difasilitasi standarisasi produk		Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Persentase IKM difasilitasi standarisasi produk	perindustrian	Disperindag
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat						Tidak ada data					pendidikan	Disdik, Bappeda
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat						Tidak ada data	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet (termasuk facebook, twiter, BBM, Whatsapp)	A.2.UWND.10.4	Program Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/ Kota melalui Pemanfaatan TIK	Persentase PD yang mendapat layanan jaringan komunikasi data yang memadai	komunikasi & informatika	Diskominfo
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		68,70%		68,79%		Telah mencapai target	Persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler (HP)/ nirkabel atau komputer	A.2.UWND.10.3			komunikasi & informatika	Diskominfo
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		30,17%		48,11%		Telah mencapai target	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet (termasuk facebook, twiter, BBM, Whatsapp) dalam 3 bulan terakhir	A.2.UWND.10.4	Program Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/ Kota melalui Pemanfaatan TIK	Persentase PD yang mendapat layanan jaringan komunikasi data yang memadai	komunikasi & informatika	Diskominfo
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	Menurun menjadi 0,36	0,36					Telah mencapai target		A.1.AKM.4			sosial	Dinsos

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	Menurun menjadi 7-8%	11,71	11,49				Belum mencapai target		A.1.AKM.7			sosial	Dinsos
					10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.														
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurangnya Desa Tertinggal sebanyak 5.000 desa.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	-		3			Telah mencapai target			1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 2. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	1. Prosentase desa dengan peningkatan status 2. Persentase perangkat desa dan lembaga desa yang lulus pelatihan	pemberdayaan masyarakat & desa	DPMD
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkatnya Desa Mandiri paling sedikit sebanyak 2.000 desa.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa			5	28		**Telah mencapai target**			1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 2. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	1. Prosentase desa dengan peningkatan status 2. Persentase perangkat desa dan lembaga desa yang lulus pelatihan	pemberdayaan masyarakat & desa	DPMD
					10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.				5,1	5,2	5,2								
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14% pada tahun 2019 (2014: 16,64%).	Menurun menjadi 14%		10,6	9,8	9,8		**Telah mencapai target**		A.1.AKM.7	1. Program bantuan bidang pendidikan 2. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 3. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 4. Program peningkatan kesempatan kerja 5. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 6. Program transmigrasi regional 7. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 8. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 9. Program pembinaan anak terlantar 10. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 11. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo 12. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya) 13. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	1. Persentase siswa SD/SMP penerima BOS 2. Persentase penduduk miskin yang menerima bantuan iuran 3. Persentase pencari kerja dilatih yang bekerja 4. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 5. Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 6. Jumlah transmigrasi yang ditempatkan 7. Persentase KFM yang meningkat produktifitasnya secara sosial ekonomi 8. Persentase PMKS yang mampu menghadapi situasi kritis termasuk korban bencana 9. Persentase anak yang meningkat kemampuanya dalam pemenuhan kebutuhan dasar 10. Persentase penyandang disabilitas yang berfungsi secara fisik 11. Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial 12. Persentase PMKS yang mampu berintegrasi sosial 13. Persentase PSKS yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	sosial	Dinsos
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun											sosial	Dinsos
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 2,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta								A.2.UWND.1.5	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Kasus Yang Diselesaikan dengan PB	tenaga kerja	Disnaker
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019	3,7 juta rumah tangga		Inkoklusif	81,27%	86,27%		Telah mencapai target	Rumah tidak layak huni masih sekitar 18.589 unit atau sekitar 2,63%	A.2.UWD.4.1	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah layak huni dan prasarana dasar lingkungan yang layak	perumahan rakyat & kawasan permukiman	Disperkimtan
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada						Tidak ada data	PT. Citra Bangun Selaras (CBS) bertujuan untuk pengelolaan prasarana infrastruktur pada kawasan khusus dan fasilitas lainnya. Pembentukan PT. CBS ditetapkan melalui Perda No 13 Tahun 2011				pekerjaan umum & penataan ruang	DPUTR

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		2164	1976	4222		Tidak mencapai target	Pada tahun 2019, peningkatan signifikan terjadi pada jumlah korban banjir yang terdampak dan mengungsi	A.2.UWD.6.8	Program penanganan darurat kebencanaan	Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	BPBD
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	Menurun menjadi 30%		119,97	115,01	111,33		Tidak mencapai target	Dokumen IRBI yang dikeluarkan BNPB berdasarkan jumlah keseluruhan jenis bencana yang ada di wilayah masing - masing kab/kota di Indonesia		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	Persentase Pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Bandung	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	BPBD, Bappeda
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada		2	2	9		Telah mencapai target			Program penanganan darurat kebencanaan	Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	BPBD
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	n/a					Tidak ada data					ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	BPBD
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	Meningkat menjadi 80%		22,26%	23,18%	25,99%		Belum mencapai target	Persentase pengelolaan sampah	A.2.UWD.3.1.17	Program Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan	Presentase volume sampah yang dapat dikelola	lingkungan hidup	DLH
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan green water, green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui reduce-reuse-recycle), green transportation khususnya di 7 kawasan perkotaan metropolitan, hingga tahun 2019.	Meningkat/ada		1	1	1		Telah mencapai target			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada kegiatan Koordinasi Kota Sehat/Adpura	Jumlah Koordinasi Adipura	lingkungan hidup	DLH
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.	Meningkat/ada						Tidak ada data	Luas ruang terbuka hijau	A.2.UWD.3.2.1	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase luas ruang terbuka hijau perkotaan	pekerjaan umum & penataan ruang	DPUTR
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada					Ada		Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Bandung Tahun 2018 - 2022		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	Persentase Pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Bandung	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	BPBD, Bappeda

bapp

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	12,4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	-Jumlah penghasil Limbah B3 yang membuat Ijin TPS LB3 sebanyk 30 perusahaan	-Jumlah penghasil Limbah B3 yang membuat Ijin TPS LB3 sebanyk 14 perusahaan	-Jumlah penghasil Limbah B3 yang membuat Ijin TPS LB3 sebanyk 24 perusahaan	-Jumlah penghasil Limbah B3 yang membuat Ijin TPS LB3 sebanyk 36 perusahaan	- Timbulan limbah B3 yang terdata dari laporan semester penghasil LB3 sekitar 21 perusahaan terdata 2153 ton LB3 pertanggal 10 oktober 2020. - Jumlah izin baru TPS LB3 terdata 11 penghasil LB3 dan 15 Perpanjangan TPS LB3	Belum mencapai target	Jumlah limbah B3 yang dikumpulkan untuk diolah dan dikelola ke pihak ketiga Penambahan jumlah Pengumpulan LB3 bersumber dari meningkatnya izin LB3 Baru serta meningkatnya kesadaran industri untuk melaporkan data LB3	A.2.UWD.5.11	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada kegiatan Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	Jumlah usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan yang dibina/diawasi dan jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti program PROPER, PROPERDA, PROPERKAB	lingkungan hidup	**DLH**
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	12,5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).	20 ton per hari (skala nasional)	21,5 ton	65,67 ton	473,68 ton			Telah mencapai target (Buku Putih Sanitasi, DIKPLHD 2017, 2018)	Jumlah sampah yang didaur ulang, sampah yang termanfaatkan di sumber sampah serta pembatasan timbulan sampah	A.2.WND.5.44	Program Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan	Presentase volume sampah yang dapat dikelola	lingkungan hidup	**DLH**
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	12,6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019.	Meningkat						Tidak ada data			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada kegiatan Pengembangan produksi ramah lingkungan	jumlah monitoring dan pembinaan produksi ramah lingkungan	lingkungan hidup	**DLH**
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	12,7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019.	Meningkat						Tidak ada data	Pengembangan produk ramah lingkungan berupa juknis produksi bersih untuk dying dan produksi kertas yang diterapkan	jumlah monitoring dan pembinaan produksi ramah lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada kegiatan Pengembangan produksi ramah lingkungan	jumlah monitoring dan pembinaan produksi ramah lingkungan	lingkungan hidup	**DLH**
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	12,8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	n/a			81%		Belum mencapai target (DIKPLHD 2017,2018)	Peraih penghargaan sebagai Fasilitas Publik Pelopor yang telah Berkomitmen Menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-pos Fasilitas Publik Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan				lingkungan hidup	**DLH**
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	LINGKUNGAN	13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.	ada		2	0	1	Ada	Telah mencapai target	Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Bandung Barat		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	Persentase Pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Bandung	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	**BPBD**
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	LINGKUNGAN	13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		2164	1976	4222		Belum mencapai target	Pada tahun 2019, peningkatan signifikan terjadi pada jumlah korban banjir yang terdampak dan mengungsi		Program penanganan darurat kebencanaan	Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	**BPBD**

par

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	LINGKUNGAN	15,1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	Meningkat		31% atau 40734,18 Ha		9,20% atau 19171,04 Ha		Belum mencapai target (DIKPLHD 2017)	Luas tutupan hutan dan luas tutupan non hutan vegetasi dibandingkan luas wilayah Sumber: IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) DIKPLHD 2017, Tahun 2019 Lap.Teknokratis	A.2.UWD.3.2.5	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah penyusunan IKTL serta penyelenggaraan Gerakan SATAPOK	kehutanan	DPUTR
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	LINGKUNGAN	15,3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	5,5 juta ha (skala nasional)	tidak ada kegiatan	Belum ada	Rehabilitasi 5000 m2(0,5 ha) 0,00038% , lahan kritis : 84711 Ha	Rehabilitasi 12.500 m2 (1,25 ha) 0,00096% , Lahan kritis : 85855 Ha	tidak ada kegiatan	Belum mencapai target	Data lahan kritis: 43,619 Ha (Potensi Kerusakan Tinggi untuk produksi Biomassa) Meningkatnya proporsi rehabilitasi terhadap lahan kritis. ***Sumber: DIKPLHD 2017,2017 Luas Lahan KBB 130.577,40 Ha***	A.2.UWD.3.1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah penyusunan IKTL serta penyelenggaraan Gerakan SATAPOK	lingkungan hidup	DLH
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	LINGKUNGAN	15,6	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada		Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data		Tidak ada data	berdasarkan hasil kajian di 16 Kecamatan pada tahun 2013 - 2018)				lingkungan hidup	DLH
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	LINGKUNGAN	15,9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019.	Meningkat						Tidak ada data	Taman kahati merupakan implementasi masterplan kahati		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah koordinasi serta penyediaan sarana dan prasarana Taman Kehati	lingkungan hidup	DLH
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun							Jenis tindak pidana kejahatan terhadap nyawa Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan patroli petugas (kali/hari)	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	**Satpol PP**
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun											ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	**Satpol PP**

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun									Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penegakan Perda	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	**Satpol PP**
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.	Meningkat							Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk Tahun 2016-2017 jumlah linmas 5.600 Tahun 2018-2019 jumlah linmas 5.755 Peningkatan jumlah penduduk tidak diikuti peningkatan linmas sehingga rasionya terus menurun setiap tahun		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan patroli petugas (kali/hari)	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	**Satpol PP**
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun							Data meningkat dikarenakan sosialialisasi maka masyarakat sudah berani melapor atas kekerasan yang dialami oleh perempuan dan laki-laki	A.2.UWND.2.4	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	Jumlah Terbentuknya lembaga P2TP2A di setiap Kecamatan	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	**DP2KBP3A**
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).	Menurun							Data meningkat dikarenakan sosialialisasi maka masyarakat sudah berani melapor atas kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak (Data kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan / Jumlah Kekerasan x 100%)	A.2.UWND.2.7	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	Jumlah Terbentuknya lembaga P2TP2A di setiap Kecamatan	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	**DP2KBP3A**
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	21	41	52	55			Data meningkat dikarenakan sosialialisasi maka masyarakat sudah berani melapor atas kekerasan yang dialami oleh perempuan dan laki-laki		Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	Jumlah Terbentuknya lembaga P2TP2A di setiap Kecamatan	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	**DP2KBP3A**
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).	Meningkat menjadi 4,0							Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Sumber: Laporan Survey Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) Pemerintah Kabupaten/Kota				statistik	**BPS, Diskominfo**

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat							Realisasi belanja daerah Sumber: LKPJ		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1. Persentase jumlah program dalam dokumen perencanaan yang teranggarkan dalam APBD 2. Persentase serapan belanja daerah 3. Persentase jumlah PD yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAP	Keuangan	**BKAD, Bapenda**
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%		WDP (75%)	WDP (75%)	WTP (100%	1	**Telah mencapai target**	Opini BPK terhadap status laporan keuangan	A.1.AKM.27	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1. Persentase jumlah program dalam dokumen perencanaan yang teranggarkan dalam APBD 2. Persentase serapan belanja daerah 3. Persentase jumlah PD yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAP	Keuangan	**Setda,BKAD, Bapenda**
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%		64,88%	65,72%	66,00%		**Telah mencapai target**			1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Keuangan	**Setda,BKAD, Bapenda**
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).	Menjadi menjadi 80%									Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui ULP	Keuangan	**Setda,BKAD, Bapenda**
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA).	Meningkatk menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	n/a						Persentase Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Nilai B		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah objek pengawasan	Keuangan	**Setda,BKAD, Bapenda**
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	Meningkat		10%	10%	12%		Belum mencapai target	Hasil Pemilu 2014: 28% Hasil Pemilu 2019: 14,55%	A.2.UWND.2.2	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan tentang PUG, lomba penyuluhan KDRT dan gelar produk PEKKA	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	**DP2KBP3A, Setwan**
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Meningkat		21,80%	17%	13%		Belum mencapai target		A.2.UWND.2.1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan tentang PUG, lomba penyuluhan KDRT dan gelar produk PEKKA	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	**DP2KBP3A, BKPSDM**

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat							Jumlah kepemilikan akta kelahiran di bawah 5 tahun / jumlah anak di bawah 5 tahun jumlahnya meningkat, namun apabila dipersentasekan akan menurun dikarenakan adanya proses peristiwa kependudukan (lahir, mati, pindah, datang)	A.2.UWND.6.2	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan / Kepemilikan Akta kelahiran usia 0-18 Tahun (IKU)	administrasi kependudukan & catatan sipil	**Disdukcapil**
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.	Meningkat menjadi 77,4%							*Persentase penduduk usia 0-18 tahun *Terkendala data mengenai penduduk berpendapatan bawah (data tidak tersedia)	A.2.UWND.6.7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan / Kepemilikan Akta kelahiran usia 0-18 Tahun (IKU)	administrasi kependudukan & catatan sipil	**Disdukcapil**
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	Meningkat menjadi 85%				24%	95%		**Telah mencapai target (Teknokratis)**		A.2.UWND.6.2	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan / Kepemilikan Akta kelahiran usia 0-18 Tahun (IKU)	administrasi kependudukan & catatan sipil	**Disdukcapil**
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.	Meningkat									Program penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola informasi publik dengan baik	komunikasi & informatika	**Diskominfo**
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada											ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	**Bakesbangpol**
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		100%	100%	100%		Telah mencapai target	Kontribusi PAD terhadap pendapatan Sumber: LKPJ	A.1.AKM.26	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Keuangan	**BKAD, Bapenda**
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).	Di atas 12%							Rasio penerimaan pajak terhadap total pendapatan Sumber: LKPJ		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Keuangan	**BKAD, Bapenda**
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat							Realisasi pajak daerah 2016: ...% 2017: ...% 2018: ...% 2019: ...% Sumber: LKPJ		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1. Persentase jumlah program dalam dokumen perencanaan yang teranggarkan dalam APBD 2. Persentase serapan belanja daerah 3. Persentase jumlah PD yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAP	Keuangan	**BKAD, Bapenda**

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%).	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi							Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet (termasuk facebook, twiter, BBM, Whatsapp) dalam 3 bulan terakhir Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat	A.2.UWND.10.4			komunikasi &	**Diskominfo**
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi.	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.							Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet (termasuk facebook, twiter, BBM, Whatsapp) dalam 3 bulan terakhir Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat	A.2.UWND.10.4	Program Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/ Kota melalui Pemanfaatan TIK	Persentase PD yang mendapat layanan jaringan komunikasi data yang memadai	komunikasi & informatika	**Diskominfo**
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,8	Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		30,17%		48,11%		Telah mencapai target (Statistik Kesejahteraan Rakyat KBB 2017,2019)	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet (termasuk facebook, twiter, BBM, Whatsapp) dalam 3 bulan terakhir Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung	A.2.UWND.10.4			komunikasi & informatika	**Diskominfo**
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).	ada							Pembangunan Infrastruktur yang Dibiayai Melalui Mekanisme Pinjaman Daerah Serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021				Keuangan	**Setda,BKAD, Bapenda**
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(b	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.	ada							Terdapat alokasi dana APBD untuk penyiapan, transaksi, dan dukungan Pemda bagi proyek KPBU				Keuangan	**Setda,BKAD, Bapenda**
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		100%	100%	100%		Telah mencapai target	Sumber: LAKIN BPS Kabupaten Bandung Barat		Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik		statistik	**BPS, Diskominfo**

pa

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Keterangan	*Catatan	NO. INDIKATOR RPJMD	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	JENIS URUSAN	PD Penanggungjawab Kabupaten
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(b	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		100%	100%	100%		Telah mencapai target	Sumber: LAKIN BPS Kabupaten Bandung Barat		Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik		statistik	**BPS, Diskominfo**
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(c	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	n/a						Sumber: LAKIN BPS Kabupaten Bandung Barat		Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik		statistik	**BPS, Diskominfo**
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(d	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat											Perencanaan	**Bappeda**
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk	EKONOMI	17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk	17.19.2.(b	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada							jumlah penerbitan / kepemilikan akta kematian yang diterbitkan s.d		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan / Kepemilikan Akta Kematian (IKU)	statistik	**BPS, Diskominfo, Disdukcapil**
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk	EKONOMI	17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk	17.19.2.(c	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat							Sumber: LAKIN BPS Kabupaten Bandung Barat		Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik		statistik	**BPS, Diskominfo**
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di	17.19.2.(d	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		100%	100%	100%		Telah mencapai target	Sumber: LAKIN BPS Kabupaten Bandung Barat		Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik		statistik	**BPS, Diskominfo**
			1		1															

Catatan:

Terdapat 29 indikator yang sama/identik dengan indikator lainnya. Sehingga, total indikator TPB Indonesia adalah 290 indikator. Dari 290 indikator, 14 di antaranya merupakan indikator khusus untuk daerah dengan kriteria tertentu. Dengan demikian, indikator yang berlaku umum untuk semua daerah adalah sebanyak 276 indikator

Telah Mencapai Target

Tidak Mencapai Target

Tidak ada Data

bappeli